PANDUAN LIPUTAN TENTANG
PANDANGAN KEAGAMAAN
YANG INKLUSIF, DAMAI, DAN TOLERAN

MODUL JURNALISME INKLUSIF

PENULIS

Nabhan Aiqani
Sayyidatul Insiyah
ikhsan Yosarie
Halili

EDITOR

Bonar Tigor Naipospos

PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA

MODUL JURNALISME INKLUSIF:

PANDUAN LIPUTAN TENTANG PANDANGAN KEAGAMAAN YANG INKLUSIF, DAMAI, DAN TOLERAN

Jakarta, Juli 2023
ix + 131 halaman
200 mm x 145 mm
ISBN : 978-623-57310-9-4

PENULIS Nabhan Aiqani
Sayyidatul Insiyah
Ikhsan Yosarie
Halili
EDITOR Bonar Tigor Naipospos

LAYOUT Titikoma-Jakarta
PUBLISHING Pustaka Masyarakat Setara
Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
Telp. : (+6221) 7208850,
Fax. : (+6221) 22775683
Hotline : +6285100255123
Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com
Website : www.setara-institute.org

MODUL JURNALISME INKLUSIF:

PANDUAN LIPUTAN TENTANG PANDANGAN KEAGAMAAN
YANG INKLUSIF, DAMAI, DAN TOLERAN

KATA PENGANTAR

SETARA Institute adalah organisasi yang berbentuk perhimpunan yang didirikan pada 14 Oktober 2005 oleh 28 tokoh, pemikir, akademisi, dan pegiat HAM. Sesuai dengan tujuan pembentukannya, SETARA Institute menaruh perhatian pada pemajuan kondisi HAM dan penghapusan diskriminasi-intoleransi atas dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial lainnya di Indonesia. Dalam menjalankan mandatnya, SETARA Institute mengembangkan tiga pendekatan, yaitu riset, advokasi kebijakan, dan pendidikan publik.

Dalam melakukan monitoring kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, SETARA Institute menemukan adanya tren yang relatif tinggi seputar peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sepanjang lima tahun terakhir. Dalam temuan tersebut, SETARA Institute menemukan bahwa bibit-bibit intoleransi, eksklusivitas, dan ancaman terhadap perdamaian tumbuh di berbagai sektor mulai dari pendidikan, institusi pemerintahan, organisasi pergerakan, bahkan media. Merujuk pada data SEJUK, godaan media dalam mengejar *page views, search engine optimization*, atau *Google*

adsense membuat judul berita dan diksi yang dipilih cenderung sensasional. Akibatnya, tak jarang media justru menjadi pemantik dalam membentuk *framing* dan katalisator terhadap eksklusivitas kelompok korban atau minoritas. Hasil penelitian SETARA Institute juga menyebutkan bahwa media massa juga turut membangun pola segregasi dalam konteks komunikasi. Padahal, media seharusnya dapat berperan optimal dalam memberikan fungsi edukasi, sosialisasi, dan literasi mengenai toleransi dan kerukunan serta sebagai arena dan ruang diskursus dalam pencegahan diskriminasi dan intoleransi.

Merespon kondisi tersebut, SETARA Institute menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi para jurnalis tentang Jurnalisme Inklusif (*Inclusive Journalism*) dengan diawali penyusunan modul. Rangkaian kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kapasitas bagi para jurnalis mulai dari bagaimana merespon isu, hingga menghasilkan produk-produk jurnalisme terutama pemberitaan dan opini yang bersifat inklusif dengan mengutamakan nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan perdamaian. Pelatihan *Inclusive Journalism* ini juga dimaksudkan untuk mempromosikan nilai-nilai *Inclusive Journalism* secara lebih luas terutama terhadap kelompok jurnalis, sehingga dapat mendorong terciptanya ekosistem media yang lebih kondusif terhadap pemajuan inklusi sosial di masyarakat. Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari program yang sedang dijalankan oleh SETARA Institute bersama konsorsium INKLUSI yang terdiri dari 6 (enam) organisasi masyarakat sipil lainnya dan kampus, yaitu Fatayat NU Jawa Timur, Fatayat NU Jawa Barat, International NGO Forum on Indonesian *Development*

(INFID), Maarif Institute, Media Link, Unika Soegijapranata, dan Yayasan Inklusif.

Program ini menyasar kepada jurnalis dan organisasi perempuan berbasis keagamaan *(faith-based women's organization)* dengan maksud membekali para jurnalis dan perempuan dengan pemahaman dan pengetahuan mengenai pandangan keagamaan yang inklusif, damai, dan toleran sehingga mampu mengaktualisasikan keterampilan jurnalisme inklusif dalam menuliskan dan menghasilkan produk-produk karya jurnalisme inklusif, berupa berita, opini, *feature*, video dan foto jurnalistik, maupun *podcast,* yang mampu menarik minat dan membangkitkan kesadaran pembaca akan persoalan-persoalan yang selama ini luput dan bukan menjadi mainstream issues.

Sekalipun modul ini didesain untuk jurnalis dan organisasi perempuan berbasis keagamaan, namun penyajiannya yang rinci memungkinkan siapa saja dapat menggunakan modul ini. Panduan-panduan penulisan atau pembuatan produk jurnalistik dalam modul ini memungkinkan setiap orang mengaplikasikan kegiatan serupa di lingkungannya. Replikasi dari kegiatan ini akan mempercepat penyebaran gagasan baik. Untuk itu, SETARA Institute berharap bahwa modul ini tidak hanya dibaca oleh jurnalis maupun organisasi perempuan berbasis keagamaan, namun juga bisa digunakan oleh aktivis NGO, aktivis perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, maupaun lingkup masyarakat yang lebih luas.

SETARA Institute berterimakasih kepada seluruh pihak yang

terlibat dan berkontribusi sejak awal penyusunan modul ini. Semoga pelatihan yang dilakukan dan modul yang disusun ini dapat bermanfaat guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik bagi seluruh warga negara.

Jakarta, Juli 2023
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

ISMAIL HASANI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii
Daftar Isi vii

KURIKULUM MODUL 1
A. Kerangka Rancangan Modul 1
B. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 3
C. Silabus Pelatihan 5

BAGIAN I PENDAHULUAN 9
A. Latar Belakang 9
B. Tujuan Modul Pelatihan 11
C. Kepesertaan 12
D. Penilaian Kebutuhan Belajar **(***Learning Need Assessment)* .. 14

BAGIAN II
PRE-TUTORIAL; ANALISIS DAN PENDALAMAN MATERI I..19
A. Handout Materi 19
1. Materi Inti 19
2. Materi Umum 29
2.1. Jurnalisme Berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) 29
2.2. Jurnalisme dan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

(KBB).....41
2.3. Jurnalisme Berperspektif Gender.....50
2.4. Jurnalisme Berperspektif Minoritas.....56
2.5. Narasi Alternatif dalam Praksis Jurnalisme.....59

BAGIAN III
PRE-TUTORIAL; ANALISIS DAN PENDALAMAN MATERI...69
A. Penerapan Jurnalisme Inklusif.....69
1. Teknik Jurnalisme Inklusif.....69
1.1. Bagaimana Jurnalisme Inklusif di operasionalisasikan?....70
1.2. Aspek Penting Liputan Jurnalisme Inklusif:.....71
1.3. Bentuk Produk Jurnalisme Inklusif 76
1.4. Langkah-langkah dalam menerapkan Jurnalisme Inklusif.....78
2. Memahami Produk Karya Jurnalisme Inklusif.....79
2.1 Berita.....79
2.2. Opini.....83
2.3. *Feature*.....*89*
3. Manajemen Redaksi Jurnalisme Inklusif.....94

BAGIAN IV
PEMAKNAAN KERANGKA PEMBELAJARAN 99
A. Latihan Berbasis Masalah *(Problem Based Learning)*.....99
1. Latihan Berbasis Masalah pada Jurnalisme Inklusif.....101
Kisi-kisi Pertanyaan tentang Jurnalisme Inklusif.....101
2. Latihan Berbasis Masalah pada Produk Karya Jurnalisme Inklusif.....104
2.1 Berita.....104
Kisi-kisi pertanyaan tentang analisis Berita.....107
2.2. Opini.....108

Kisi-kisi Pertanyaan tentang Analisis Opini 111
2.3. *Feature* 111
Kisi-kisi pertanyaan tentang Analisis *Feature* 120

BAGIAN V
PRAKTIK PELATIHAN 121
A. Lokakarya Pelatihan 121
B. Mekanisme Penyelenggaraan Lokakarya Pelatihan 122
1. Peserta Lokakarya Pelatihan 122
2. Struktur Program 123
C. Pembelajaran Berbasis Praktik *(Practice Based Learning)* . 124
1. Penulisan Berita 124
2. Penulisan Opini 125
3. Penulisan *Feature* 126
4. Internalisasi Jurnalisme Inklusif pada Manajemen Redaksi 127
5. Analisis Strategi Intervensi Media dalam Penerapan Jurnalisme Inklusif 128

REFERENSI 129

KURIKULUM MODUL

A. KERANGKA RANCANGAN MODUL

Modul Jurnalisme Inklusif ditujukan pada dua klasifikasi target peserta, yaitu kalangan jurnalis dan organisasi perempuan berbasis keagamaan *(faith-based women's organizations)*. Modul ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pandangan keagamaan yang inklusif, damai dan toleran. Substansi dan isi dari modul jurnalisme inklusif memuat beberapa hal mendasar yang berorientasi pada kompetensi pengetahuan dan sikap, penyelesaian materi-materi *(courses)* pelatihan, pelaksanaan pelatihan, evaluasi serta penyusunan rencana program dan kegiatan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pelatihan.

Agar tujuan dari penyusunan "Modul Penyelenggaraan Pelatihan Jurnalisme Inklusif" dapat berlangsung dengan efektif dan efisien, maka modul ini mengacu pada pendekatan *Contextual Teaching and Learning (CTL)* yakni konsep belajar mengajar membantu fasilitator/trainer menghubungkan isi materi pembelajaran dengan situasi kontekstual; dan memotivasi peserta pelatihan untuk membangun hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan

peserta. Dalam pengimplementasian model pembelajaran CTL, rancangan kerja pelatihan menerapkan Model ADDIE. Kerangka model ADDIE terdiri dari 5 proses, yakni A*nalysis, Design, Development, Implementation,* dan *Evaluation,* yang dielaborasi dalam modul menjadi tahapan sebagai berikut:

1) *Analysis* (Pendahuluan)

   Bagian pendahuluan akan diuraikan pada Bab 1 di modul pelatihan ini. Bagian ini berfungsi sebagai penjelasan atas latar belakang implementasi jurnalisme inklusif, tujuan menyelenggarakan pelatihan, target kepesertaan dan penilaian kebutuhan belajar (learning need assessment)

2) *Design* (Pre-Tutorial)

   Bagian pengumpulan informasi pada Bab 2 dari modul pelatihan. Di dalam bagian ini akan tersedia dua (2) jenis materi yang meliputi materi inti tentang jurnalisme inklusif dan materi umum yang dipandang penting dalam memperluas wawasan peserta tentang penerapan jurnalisme inklusif.

3) *Development* (Pemaknaan)

   Bagian pengolahan informasi dipaparkan di Bab 3, pada bab ini, peserta akan diminta menyelesaikan beberapa pemicu masalah (trigger) baik secara mandiri atau berkelompok

4) *Implementation* (Praktik Pembelajaran)

   Bagian praktik pembelajaran diuraikan secara mendetail dalam Bab 4 modul ini. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling menggambarkan bentuk "Penyelenggaraan Lokakarya Pelatihan Jurnalisme Inklusif."

5) *Evaluation*

Bagian perencanaan tindak lanjut merupakan bagian perluasan dari apa yang telah dipelajari peserta. Kegiatan perencanaan program dapat dituangkan ke dalam proses merencanakan kegiatan yang hendak dilakukan peserta setelah selesai mengikuti pelatihan. Di bagian ini, secara keseluruhan peserta diharapkan telah mencapai Standar Kompetensi yang ditetapkan.

B. STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

Standar kompetensi dan kompetensi dasar merupakan target capaian kompetensi yang ditetapkan modul pelatihan terhadap para peserta pelatihan. Pada fasilitator pelatih, standar kompetensi dan kompetensi dasar wajib dipenuhi seutuhnya, sehingga proses belajar berlangsung lebih panjang, sedangkan pada peserta, dapat dicukupkan pada kompetensi dasar.

Standar kompetensi adalah kualifikasi atau ukuran kemampuan dan kecakapan yang mencakup seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan. Standar kompetensi Pelatihan Jurnalisme Inklusif adalah memproyeksikan dua target peserta, terutama jurnalis dan kelompok perempuan berbasis keagamaan agar mampu menyuarakan dan menginternalisasi ruang publik dengan narasi tulisan, pesan-pesan dan karya jurnalistik yang berkaitan dengan kesetaraan, partisipasi, toleransi dan terlibat secara aktif dengan berbagai kelompok, serta mampu memberdayakan masyarakat secara beragam, baik dari aspek minoritas agama, gender, etnis, dan sebagainya.

Kompetensi dasar atau sering disebut juga dengan kompetensi

minimal, diidentifikasi ke dalam tiga jenis: Pertama, kompetensi pengetahuan *(knowledge)* yaitu kemampuan dan kecakapan pengetahuan yang terkait dengan Materi inti Pelatihan, yaitu Penerapan Jurnalisme Inklusif, dan Materi Umum yang berhubungan dengan tema dan substansi produk karya jurnalisme inklusif, meliputi Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Jurnalisme Demokratik, Inklusivitas Penyiaran, Minoritas Agama dan Gender, Deteksi Dini Paham Radikal, Perempuan, Toleransi dan Perdamaian dalam Konteks Keagamaan.

Kedua, kompetensi sikap *(dispositions)* yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan kesadaran dan komitmen Jurnalis secara khusus ataupun Redaksi Media dalam artian general, serta kelompok perempuan keagamaan memiliki komitmen dan secara konsekuen untuk menyuarakan isu-isu terkait dengan toleransi, Kelompok minoritas, Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, Demokrasi dan HAM, Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) , radikalisme, diskriminasi, dan sebagainya.

Ketiga, kompetensi keterampilan *(skills)* yaitu kemampuan dan kecakapan mengartikulasikan dan mengaktualisasikan keterampilan jurnalisme inklusif dalam menuliskan dan menghasilkan produk-produk karya jurnalisme inklusif, berupa berita, opini, *feature*, video dan foto jurnalistik, maupun *podcast*, yang mampu menarik minat dan membangkitkan kesadaran pembaca akan persoalan-persoalan yang selama ini luput dan bukan menjadi mainstream issues.

C. SILABUS PELATIHAN

No	Tahapan	Materi	Sub-Materi	Durasi	Metodologi
1	Pendahuluan		Learning need assessment	10 Menit	Survey
		Bina Suasana	Komitmen Belajar	10 Menit	
2	Pendalaman Materi	(Materi Umum) Jurnalisme Inklusif	Materi Jurnalisme Inklusif	30 Menit	Paparan Materi
			Review Materi	30 Menit	Review Teks
		Jurnalisme Berperspektif HAM	Materi	30 Menit	Paparan Materi
			Review Materi	30 Menit	Review Teks
			Praktik pembelajaran	30 Menit	Diskusi Kolaboratif
		Jurnalisme dan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan	Materi	30 Menit	Paparan Materi

No	Tahapan	Materi	Sub-Materi	Durasi	Metodologi
			Review	30 Menit	Review Teks
			Praktik pembelajaran	30 Menit	Diskusi Kolaboratif
		Jurnalisme Berperspektif Gender	Materi	30 Menit	Paparan Materi
			Review	30 Menit	Review Teks
			Praktik pembelajaran	30 Menit	Diskusi Kolaboratif
		Jurnalisme Berperspektif Minoritas	Materi	30 Menit	Paparan Materi
			Review	30 Menit	Review Teks
			Praktik pembelajaran	30 Menit	Diskusi Kolaboratif
		Jurnalisme dan Narasi Alternatif	Materi	30 Menit	Paparan Materi
			Review	30 Menit	Review Teks
			Praktik pembelajaran	30 Menit	Diskusi Kolaboratif

No	Tahapan	Materi	Sub-Materi	Durasi	Metodologi
3	Praktik Pembelajaran	Penerapan Jurnalisme Inklusif	Materi	30 Menit	Paparan Materi
			Review Materi	30 Menit	Curah Pendapat
			Problem Based Learning pada 6 Materi	30 Menit	Diskusi Kolaboratif
			Praktik Penulisan	40 Menit	Micro Teaching
	Praktik Jurnalisme Inklusif	Internalisasi Jurnalisme Inklusif pada Redaksi Media	Identifikasi, Penyusunan Rencana tindak lanjut, strategi, dan intervensi program	60 Menit	Diskusi Kolaboratif

Gambar 1:
Alur dan Substansi Implementasi Jurnalisme Inklusif

Penulisan
Produk Karya Jurnalistik
1. Berita
2. Opini
3. Feature

Embedding
Manajemen Redaksi Media
1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan (Peliputan)
4. Pengawasan

Strategi Intervensi
Intervensi pada Sektor-sektor Media
1. Pada Jurnalis
2. Media *Outlet*s
3. Institusi Media
4. Faktor Ekonomi dan Teknologo
5. Faktor Lingkungan politik, hukum, dan keamanan
6. Kepercayaan dan Nilai-nilai Kebudayaan Masyarakat

BAGIAN I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komunikasi inklusif merupakan komunikasi efektif yang bersifat menghormati, akurat dan inklusif bagi semua. Komunikasi ini memicu setiap orang untuk berkontribusi terhadap perspektif yang beragam dan menimbulkan rasa kepemilikan/keterlibatan (sense of belonging). Secara ringkas, komunikasi inklusif dapat dipahami sebagai penyebaran informasi melalui cara-cara yang dapat dipahami setiap orang, baik melalui komunikasi tertulis, lisan, maupun visual.[1]

Penerapan dan konkretisasi dari komunikasi inklusif sejalan dengan salah satu model komunikasi, yakni komunikasi tertulis, yang dalam operasionalisasinya diaktualisasikan dalam konsep Jurnalisme Inklusif (*Inclusive Journalism*). Konsep Jurnalisme Inklusif merupakan istilah yang menurut Rupar (2017) identik

1 Anonymous, Inclusive Workplace: Inclusive Communication Guide, Department of Education of Queensland Government, supported by weallbelong.

dengan upaya untuk memberdayakan dan menguatkan suara-suara kelompok *(voiceless)* yang secara tradisional dan struktural seringkali ditinggalkan dalam peliputan dan kerja jurnalistik. Dengan kata lain, Jurnalisme Inklusif merupakan komitmen jurnalistik terhadap keberagaman (baik terkait dengan orang dan perspektif) dan kesetaraan (dalam konteks kebijakan dan praktik).

Mengaitkan dengan kondisi mutakhir tentang toleransi dan inklusivitas saat ini, SETARA Institute menemukan bahwa pada ruang media dan ruang publik secara umum, bibit-bibit intoleransi, eksklusifitas, dan ancaman terhadap perdamaian tengah bertumbuh. Godaan media dalam mengejar *page views, search engine optimization,* atau *Google adsense* membuat judul berita dan diksi yang dipilih cenderung sensasional (SEJUK, 2022). Akibatnya, tak jarang media justru menjadi pemantik dalam membentuk framing dan katalisator terhadap eksklusivitas kelompok korban atau minoritas. Hal ini dikuatkan oleh hasil riset UNTAR-SEJUK-Kemenristekdikti (2017-2019) yang menyimpulkan bahwa liputan isu keberagaman tidak banyak mewakili suara-suara kelompok rentan.

Dalam realitas yang lain, perempuan seringkali menjadi sasaran atau bahkan menjadi aktor dalam gerakan radikalisme. Penelitian IPAC (2017) menjelaskan bagaimana perempuan dapat menjadi relawan bom bunuh diri, yaitu para perempuan yang direkrut dalam jaringan tersebut didoktrin setiap saat dengan pandangan keislaman yang radikal. Kekuatan peran perempuan dalam menginternalisasikan sebuah nilai, norma, dan budaya pada masyarakat semakin mempermudah merebaknya gerakan radikalisme terutama terhadap perempuan dan remaja. Dalam

persoalan radikalisme, organisasi perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya deradikalisasi sekaligus menyebarkan nilai-nilai toleransi dengan meningkatkan kualitas da'iyah dan penguatan materi dakwah (Khasanah, 2022).

Berangkat dari latar belakang tersebut, SETARA Institute memandang penting untuk berpartisipasi dengan melakukan peningkatan kapasitas berupa pelatihan bagi para jurnalis dan organisasi perempuan berbasis keagamaan. Pelatihan ini dimaksudkan sebagai ikhtiar bersama dalam membekali para jurnalis dan organisasi perempuan berbasis keagamaan dengan pengetahuan terutama dalam menulis berita, opini, maupun materi jurnalistik agar mengedepankan nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan inklusivitas. Sebagai langkah awal, SETARA Institute akan menyusun modul sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelatihan tersebut.

B. TUJUAN MODUL PELATIHAN

Modul pelatihan Jurnalisme inklusif disusun sebagai panduan dan pedoman bagi jurnalis, redaksi media, kelompok perempuan berbasis keagamaan, serta individu ataupun aktor tertentu dengan minat dan ketertarikan terhadap kerja-kerja jurnalisme dalam membangun kesadaran dan komitmen tentang pentingnya menyuarakan isu-isu yang dalam praksis di ruang publik minim mendapatkan tempat, seperti Toleransi, Kelompok minoritas, Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, Demokrasi dan HAM, Hak atas KBB, radikalisme, serta diskriminasi.

Melalui pelatihan jurnalisme inklusif, setidaknya ada dua tujuan langsung, yakni:

1) memberikan pengetahuan yang cukup kepada peserta pelatihan mengenai pentingnya membangun komitmen dan prinsip jurnalisme inklusif dalam redaksi media, dan pengetahuan tentang bentuk-bentuk karya jurnalisme inklusif itu sendiri.

2) mendukung pengarusutamaan jurnalisme inklusif oleh redaksi media, jurnalis, kelompok perempuan keagamaan, dan tidak terbatas pada individu atau organisasi dengan minat pada isu relevan, mulai dari proses perencanaan peliputan, respon atas peristiwa, dan aktivitas transfer knowledge baik dari sisi internal maupun berkontribusi dalam menyebarkan pengetahuan tentang jurnalisme inklusif pada sisi eksternal.

C. KEPESERTAAN

Modul pelatihan jurnalisme inklusif ditujukan pada 4 target kepesertaan, yakni

1. Jurnalis, merupakan seseorang dengan profesi yang bertugas untuk mencari dan meliput informasi untuk diolah menjadi berita. Dengan, peran dan tugas jurnalis, maka ketika pengetahuan tentang konsep-konsep dan isu tentang jurnalisme inklusif di internalisasi dan diterapkan pada kerja jurnalis, diharapkan suara-suara dan narasi tentang isu-isu terkait toleransi, kelompok minoritas, HAM dan Demokrasi, KBB, dan isu relevan lainnya, dapat mendapatkan tempat pada pemberitaan media.

2. Redaksi Media, merupakan unsur-unsur pimpinan dan manajemen di ruang redaksi media, yang berperan

dalam menyusun tulisan atau penerbitan dalam sebuah media massa. Redaksi juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan berita, menyusun, mengedit dan mencetak ataupun menerbitkan berita ke masyarakat luas. Pemilihan target peserta dari redaksi media, didasari oleh peran sentral yang dimiliki oleh dapur redaksi, sehingga, dengan adanya pelatihan jurnalisme inklusif arah dan orientasi pemberitaan media dapat selaras dengan tujuan untuk menyuarakan peliputan terhadap isu-isu relevan. Hal ini juga menjadi wujud kesinambungan visi dan paradigma antara jurnalis dan redaksi media dalam konteks pemberitaan.

3. Kelompok perempuan keagamaan, merupakan organisasi perempuan yang menghimpun diri baik yang berdiri sendiri maupun terafiliasi pada kelompok yang lebih besar, dalam menyuarakan isu-isu keagamaan dan perempuan. Dipilihnya kelompok ini, didasari atas terbatas dan minimnya ruang publik media yang mewadahi suara ataupun narasi perempuan terkait dengan isu keagamaan yang toleran, damai dan inklusif.

4. Individu atau aktor lainnya, merupakan orang perorangan yang menaruh perhatian dan minat pada isu-isu terkait toleransi, perdamaian dan inklusif. Dikarenakan relatif terbatasnya ruang untuk menyampaikan gagasan mereka di ruang media, pelatihan ini juga diharapkan mampu menghubungkan individu tersebut dengan jaringan media, agar tersedia ruang untuk mengekspos pandangan dan suara mereka tentang paradigma keagamaan yang toleran, damai dan inklusif.

D. PENILAIAN KEBUTUHAN BELAJAR (*LEARNING NEED ASSESSMENT)*

1. Tingkat Pengenalan mengenai Jurnalisme Inklusif

   Anda dapat menjawab beberapa item yang ditanyakan dengan skala 1-3, (1) Tidak Pernah, (2) Sesekali, (3) Sering

   Apa yang dimaksud dengan Jurnalisme Inklusif menurut pemahaman anda? Jelaskan:

Jelaskan:

2. Manakah dari bentuk karya Jurnalisme Inklusif yang pernah Anda hasilkan? Seberapa sering?

Karya Jurnalisme Inklusif	Tidak Pernah (1)	Sesekali (2)	Sering (3)
Berita: Straight News Comprehensive News Berita Mendalam Berita Investigasi lainnya...			
Opini: Artikel Opini Kolom Pakar Tajuk Esai Karikatur Pojok Lainnya...			
Feature: Tips Laporan Perjalanan Biografi Profil Resensi lainnya.....			
Video Jurnalistik			
Fhoto Jurnalistik			
Podcast			
Lainnya:			
Jumlah			

Tingkat pengetahuan atas Isu Jurnalisme Inklusif?

Literasi	Kurang (1)	Cukup (2)	Baik (3)
Penerapan Jurnalisme Inklusif pada Media			
Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi			
Demokrasi dan HAM			
Toleransi Beragama			
Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan			
Kelompok minoritas (Minoritas Agama dan Gender)			
Radikalisme			
Perempuan, toleransi dan perdamaian			
Lainnya:			
Jumlah			

Manakah dari isu yang berkaitan dengan Jurnalisme inklusif yang pernah Anda tuliskan dan seberapa sering?

Topik	Tidak Pernah (1)	Sesekali (2)	Sering (3)
Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi			
Demokrasi dan HAM			
Toleransi Beragama			
Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan			
Kelompok minoritas (Minoritas Agama dan Gender)			
Radikalisme			
Perempuan, toleransi dan perdamaian			
Lainnya:			
Jumlah			

Apakah yang dibutuhkan agar redaksi media, jurnalis, kelompok perempuan keagamaan, dan individu dengan minat pada isu relevan memiliki komitmen terhadap peliputan jurnalisme inklusif?

Kebutuhan	Tidak Penting	Penting	Sangat Penting
Pengetahuan tentang Jurnalisme Inklusif			
Kesamaan visi antara redaksi dan jurnalis			
Media-media alternatif untuk mewadahi tulisan			
Skala prioritas pada peliputan isu toleransi, KBB, radikalisme, kelompok minoritas, dan perempuan			
Traffic pembaca			
Lainnya			

Jelaskan rencana anda dalam menerapkan Jurnalisme Inklusif

Jelaskan:

BAGIAN II

PRE-TUTORIAL

ANALISIS DAN PENDALAMAN MATERI I

A. HANDOUT MATERI

1. MATERI INTI

a. Jurnalisme Inklusif

Hubungan antara media dan kohesi sosial dari masyarakat yang beragam semakin berkembang. Gagasan tentang keberagaman dan inklusivitas dalam perspektif keagamaan akan berbeda tergantung pada konteks dimana gagasan ini diartikulasikan, dirasakan, dan dioperasionalkan. Kata kunci dari inklusivitas, berdiri pada satu paradigma bahwa perbedaan dan keberagaman itu penting dan harus dirayakan sebagai fakta sosial yang baik. Semakin banyak suara didengar, semakin kuat kapasitas individu dan sosial sebagai representasi pikiran dan pandangan untuk melindungi hak dan kebebasan bagi semua, "tanpa pembedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau lainnya. pendapat, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya" (Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia, Pasal 2).[2]

Ide tentang jurnalisme inklusif berpotensi membuka garis tersembunyi wacana media dan membongkar proses dalam membangun legitimasi perspektif yang dominan. Oleh karena itu, Jurnalisme inklusif dapat didefinisikan sebagai seperangkat wacana normatif, kebijakan editorial, dan praktik pelaporan yang muncul dan dikembangkan untuk memberikan keragaman suara di ranah media. Sementara itu, mengacu pada definisi yang lain, Moring dkk. (2017) mendefinisikan jurnalisme inklusif sebagai tipe jurnalisme yang menantang hegemoni budaya untuk mencegah media secara sengaja maupun tanpa sengaja menyebarkan prasangka, intoleransi, dan kebencian.[3] Dalam kata lain, terminologi untuk menjelaskan Inklusif Jurnalisme tidak bisa dipisahkan dari paradigma tentang "keragaman," "kesetaraan," "representasi sosial," dan "inklusivitas."

Berakar pada gagasan politik demokrasi inklusif dan sistem politik yang melampaui pengakuan kesetaraan formal semua individu, gagasan jurnalisme inklusif mengkaji tindakan dan respon khusus jurnalis untuk mengatasi dan menanggapi ketidaksetaraan struktur sosial yang tidak adil. Menurut Rupar dan Pesic (2017) tujuan jurnalisme inklusif adalah mengembangkan kompetensi komunikatif inklusif, dengan mengaktifkan pemikiran reflektif, pengalaman pluralisme

2 Verica Rupar and Chao Zhang, *Inclusive Journalism*, Media Diversity Institute, January 2022, hal. 5.

3 Novia Kurnia, et. al., Modul Jurnalisme Inklusif: Liputan tentang Perempuan, Anak, dan Difabel Selama Pademi, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UGM, September 2021.

sosial, politik dan budaya, serta pengakuan terhadap keberbedaan dan sikap kritis terhadap proses konstruksi identitas.

Mengapa Jurnalisme Inklusif penting dalam isu Toleransi, keberagaman, dan inklusivitas keagamaan?

Semua tahapan dalam produksi berita menimbulkan tantangan dalam kerja jurnalisme: mulai dari menemukan topik dan mendekati sumber informasi hingga menyediakan informasi latar belakang yang diperlukan, menemukan sudut pandang, dan menyajikan sebuah berita. Liputan media yang buruk tentang agama biasanya memerlukan "pelabelan" individu dan/atau kelompok, penggunaan data secara selektif, generalisasi insiden, stereotip negatif, memberikan satu sisi cerita, menggunakan kata-kata yang menghina, mencampurkan fakta dan pandangan, tidak adanya pemeriksaan fakta, dan konten yang tidak sesuai dengan judul, gambar, dan suara (Rupar 2012).

Miskonsepsi dalam *mainstreaming* media yang terlalu bersifat eksklusif dan seringkali mendiskreditkan kelompok minoritas dan rentan, merupakan akumulasi dari pola tantangan kerja jurnalisme yang abai terhadap aspek teknis dan substantif yang menjadi dasar dalam penerapan kode etik jurnalis. Untuk menciptakan inklusi, bagian terbesar dari solusi terletak di dalam dan bukan di luar organisasi/ ruang redaksi. Dengan membangun budaya saling memiliki, merangkul perubahan, menantang pola umum *(common)* dan menantang definisi objektivitas, akan memicu munculnya inklusivitas. Kata kunci dari karakteristik yang mesti dimiliki

seorang jurnalis yang inklusif adalah sebagai pendengar yang baik, rendah hati, inovatif, sadar diri dan bersedia aktif mengubah *status quo*.

Pada prinsipnya, pedoman penting bagi jurnalis ataupun kelompok perempuan berbasis keagamaan *(expert)* dalam praktik jurnalisme yang bertanggung jawab secara sosial -- dasar dalam implementasi jurnalisme inklusif-- mesti berbasis pada:[4]

1. Pelaporan mendalam *(in-depth reporting),*
2. Menyediakan informasi latar belakang,
3. Penjelasan tentang konteks legal/hukum,
4. Mempertimbangkan dampak,
5. Memberikan kesempatan bersuara kepada kelompok rentan *(voiceless),*
6. Menunjukkan rasa hormat,
7. Meningkatkan kesadaran tentang keberagaman
8. Menghindari stereotip
9. Mengambil tindakan terhadap praktik diskriminasi
10. Bergerak melebihi peristiw*a (moving beyond),* tidak hanya terbatas pada aspek teknis penyusunan karya jurnalis, tapi berkembang dan bergerak lebih jauh, semisal dalam upaya-upaya advokatif
11. Meminimalkan kerugian dari dampak yang ditimbulkan

Sementara itu, seperti dijelaskan sebelumnya, karakteristik dari Jurnalisme Inklusif mesti dilandasi oleh 4 prinsip

4 Verica Rupar dan Chao Zhang, op. cit., hal. 17.

penting, sebagai berikut (1), Keberagaman, mengakomodir berbagai perbedaan dan kesamaan tanpa terkecuali, (2) Inklusi, komitmen untuk mengakomodir semua yang terlibat untuk menimbulkan rasa kepemilikan. Inklusi adalah pilihan untuk mengubah perilaku dan melakukan upaya untuk menumbuhkan rasa pemberdayaan. (3) Keadilan, fondasi dasar untuk memastikan bahwa proses dan program tidak ada keberpihakan, dan (4) Rasa Kepemilikan, merupakan hasil dari penerapan jurnalisme inklusif. Suatu perasaan yang tidak bisa dipaksakan.[5]

Keberagaman	mengakomodir berbagai perbedaan dan kesamaan tanpa terkecuali
Inklusi	komitmen untuk mengakomodir semua yang terlibat untuk menimbulkan rasa kepemilikan. Inklusi adalah pilihan untuk mengubah perilaku dan melakukan upaya untuk menumbuhkan rasa pemberdayaan
Keadilan	fondasi dasar untuk memastikan bahwa proses dan program tidak ada keberpihakan,

5 https://inclusivejournalism.medium.com/six-characteristics-of-inclusive-journalism-4df2bf7cf9f0

Rasa Kepemilikan	merupakan hasil dari penerapan jurnalisme inklusif. Suatu perasaan yang tidak bisa dipaksakan.

Di sisi lain, ruang redaksi media dan jurnalis mesti memahami dan membangun kultur untuk mewujudkan Jurnalisme Inklusif agar mampu menerapkan prinsip-prinsip yang dibangun demi mencapai tujuan dari redaksi media dan jurnalis untuk menyuarakan keberagaman dan inklusivitas pada ruang publik. Sebelum bergerak menuju penerapan jurnalisme inklusif, ada beberapa karakteristik yang mesti dipahami oleh redaksi media maupun jurnalis, sebagai berikut:[6]

1. Komitmen Jangka Panjang

Seringkali dalam kerja jurnalistik,hanya terfokus pada kesuksesan jangka pendek. Siklus berita harian hampir tidak memberi waktu untuk merenungkan cerita atau diri kita sendiri, dan sebaliknya ingin agar segera menghasilkan laporan, program, atau artikel berikutnya. Dan karena tekanan pada kinerja, kontrak musiman, dan kurangnya strategi jangka panjang, kami cenderung terus melakukan hal yang sama berulang kali.

Perubahan perilaku yang nyata terjadi ketika kita melibatkan pikiran dan tubuh. Mengorganisir pelatihan keragaman lain atau hanya membaca lebih banyak tentang topik inklusi untuk memahaminya pada tingkat mental, tidaklah cukup. Perubahan dilakukan dengan praksis, dengan melakukan. Tindakan kecil

6 https://inclusivejournalism.medium.com/six-characteristics-of-inclusive-journalism-4df2bf7cf9f0

dan berulang dalam jangka waktu yang lebih lama akan menyebabkan perubahan yang signifikan.

2. *Self-awareness (Conscious of unconscious bias)*

Bekerja secara inklusif hanya dapat dilakukan ketika ruang menyadari bias dan prasangka. Setiap Bias bawah sadar adalah stereotip sosial tentang kelompok orang tertentu yang dibentuk individu di luar kesadaran mereka sendiri. Kesadaran diri berarti mengenal diri kita dengan baik, dan menyadari posisi kita dalam masyarakat ini menurut ras, kelas, jenis kelamin, kemampuan, pendidikan, dll. Posisionalitas berhubungan langsung dengan konsep objektivitas dalam jurnalisme. Sebagai jurnalis, kita cenderung memposisikan diri di luar dunia ini, sebagai pengamat yang objektif dan netral. Kami dapat berusaha seobjektif mungkin, tetapi tidak mungkin melaporkan sepenuhnya netral.

Kesadaran diri berarti melihat ke dalam dan bukan ke luar untuk mencari solusi. Begitu kita secara sadar merenungkan hidup kita, akan lebih mudah untuk mendengarkan dan tetap ingin tahu. Tujuan menciptakan kesadaran diri pada akhirnya adalah untuk menjadi lebih terinformasi dalam keputusan kita dan karena itu lebih efektif dalam apa yang kita lakukan. Refleksi diri adalah keterampilan yang dapat dipelajari oleh siapa saja yang mau duduk dan mengamati lanskap batin.

3. *Community (Engagement)*

Membangun kepercayaan di antara komunitas sangat penting untuk jurnalisme inklusif. Untuk membangun kepercayaan, jurnalis tidak boleh hanya pergi ke komunitas ketika keadaan

memburuk. Ini tentang terhubung dengan orang-orang di saat-saat yang menyenangkan dan menciptakan hubungan untuk jangka panjang. Mendengarkan adalah aspek kunci dari pembangunan komunitas. Wartawan terkadang enggan untuk terlalu bersahabat dengan masyarakat karena takut hal itu dapat melemahkan sikap kritis mereka terhadap suatu isu. Tapi sebagai jurnalis sudah memiliki hubungan alami dengan komunitas kami sendiri, tempat kami dibesarkan, dengan orang-orang yang mirip dengan kami. Dan membangun komunitas pada tingkat profesional berarti dengan semua orang, bukan hanya milik Anda sendiri.

Akan lebih mudah untuk terhubung ke berbagai komunitas dalam masyarakat jika ruang redaksi adalah cerminan masyarakat. Jika ini belum terjadi, kami perlu memastikan untuk mendiversifikasi jaringan sumber kami dan menghargai pengetahuan rekan generasi yang lebih tua. Mentoring bisa menjadi alat yang baik untuk memperkuat keterampilan kita dan saling melengkapi.

4. Mencerahkan bukan hanya menginformasikan

Pencerahan sering dipahami dalam konteks spiritual di mana para buddha menemukan pencerahan setelah meditasi seumur hidup. Di Asia, kata itu lebih umum daripada di Barat dan itu berarti memberi (seseorang) pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang suatu subjek atau situasi.

Mengapa ini penting untuk dimasukkan? Nah, Laporan Berita Digital 2022 oleh Reuters Institute menunjukkan meningkatnya kejenuhan berita di kalangan konsumen berita yang sebagian

terkait dengan berita negatif. Jika kita ingin tetap menyertakan orang, kita perlu mengubah ini.

Selain itu, begitu Anda menyelami lebih dalam sebuah cerita untuk benar-benar memahami akar penyebab sebuah masalah — yang memang dituju oleh Jurnalisme Solusi — otomatis akan lebih banyak orang yang memiliki posisi dalam cerita Anda, bukan sebagai korban tetapi sebagai suara yang kredibel. Kita tidak harus menjadi suara orang yang tidak bersuara. Yang tak bersuara sudah punya suara. Pelaporan yang ketat akan memperkuat suara-suara ini.

Data yang Anda gunakan untuk menunjukkan bukti pelaporan dapat berkontribusi pada lebih banyak kejujuran dan lebih sedikit bias. Dan pengalaman menunjukkan betapa bermanfaatnya bagi kesejahteraan kita untuk menerapkan cara mendongeng yang konstruktif. Itu membuat kami merasa kurang terkuras dan menekankan alasan mengapa kami memilih jurnalisme, untuk menceritakan kisah yang mungkin menyebabkan perubahan.

5. Dekolonial

Kita hidup di masa di mana pengetahuan tentang masa lalu kolonial semakin berkembang, namun jurnalis dapat berkontribusi aktif dengan menerapkan dekolonialitas dalam segala hal yang mereka lakukan. Artinya, memberikan konteks bagaimana struktur kekuasaan kolonial masih berjalan hingga saat ini. Kolonialisme telah menjadikan Barat sebagai pusat dunia, telah menciptakan sistem kapitalisme yang selalu hadir dengan sisi gelap, dan menggunakan gender sebagai alat

untuk merendahkan dan menindas. Bagaimana narasi itu masih dimainkan di dunia kita saat ini dan apa yang dapat kita lakukan untuk melepaskannya?

Dekolonialitas dalam jurnalisme mencakup pertimbangan ulang mendasar tentang siapa yang melaporkan (posisionalitas), bagaimana lokasi dan identitas seorang penulis membentuk perspektif mereka dan sumber mana yang digunakan saat membuat sebuah cerita. Itu melihat pada pokok bahasan dan bagaimana hal itu dibawa ke berita. Menerjunkan wartawan Barat ke negara-negara berkembang untuk melaporkan hal-hal yang hampir tidak mereka ketahui, bukanlah cara yang tepat lagi.

Mendidik diri sendiri tentang masa lalu kolonial dengan tujuan memahami akar masyarakat dan nilai-nilai Barat kita, dapat dilakukan dengan belajar dari orang-orang di luar Barat.

6. Pendekatan Holistik

Pendekatan holistik berarti melihat gambaran yang lebih besar. Dan disinilah kesehatan mental masuk. Jika kita tidak merencanakan untuk jangka panjang, kita segera menciptakan masalah (dan stres) ketika keputusan jangka pendek tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Jika kita tidak sadar diri dan memahami bias bawah sadar kita, kita akan terus melaporkan masalah tanpa mengetahui akar penyebabnya sehingga kita akan merasa belum selesai. Jika kita tidak terhubung dengan orang-orang di komunitas, kita akan menemukan diri kita terisolasi dalam pekerjaan kita. Jika kita tidak mengetahui masa lalu kolonial atau sisi gelap kehidupan kita saat ini, kita tidak akan bisa maju dengan cara yang berbeda.

Pandangan holistik tentang jurnalisme meminta kita untuk menghubungkan titik-titik tersebut. Ini juga merangkum penyambutan disiplin ilmu lain ke dalam profesi dan fokus pada kolaborasi interdisipliner. Di Barat, kami terbiasa mencari solusi untuk masalah dengan mengisolasi masalah. Kamus Bahasa Inggris Oxford mendefinisikan holistik sebagai "ditandai dengan pemahaman bagian-bagian dari sesuatu yang saling berhubungan erat dan dapat dijelaskan hanya dengan mengacu pada keseluruhan." Dalam konteks jurnalisme inklusif, ini berarti fokus pada profesi jurnalisme yang tidak terisolasi dari dunia luar

2. MATERI UMUM

2.1. JURNALISME BERPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Dalam singgungannya antara HAM dengan jurnalisme, dikenal pula dengan human rights journalism, yaitu model pemberitaan atau reporting yang menawarkan refleksi kritikan tentang pengalaman-pengalaman dan kebutuhan dari korban dan pelaku dari pelanggar HAM. Hal ini dimaksudkan untuk memahami alasan-alasan di balik terjadinya pelanggaran guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM lebih lanjut sekaligus untuk menyelesaikan pelanggaran saat ini dengan cara yang tidak menimbulkan kekerasan lebih lanjut di masa depan. Human rights journalism atau jurnalisme berbasis HAM ini didasarkan pada premis bahwa apabila jurnalisme memerankan peran yang sentral di lingkungan masyarakat, maka jurnalisme seharusnya lebih berfokus pada upaya dekonstruksi penyebab struktural terjadinya kekerasan

politik seperti diskriminasi terhadap minoritas, marginalisasi kelompok, perdagangan manusia, kerja paksa, kemiskinan, migrasi paksa, dan beberapa permasalahan sosial lainnya, daripada berfokus hanya pada sikap dan perilaku elit yang menguntungkan dari terjadinya kekerasan tersebut. Dalam praksisnya, *human rights journalism* juga membawa resonansi tentang pendekatan keadilan untuk membantu dan melibatkan setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian situasi kekerasan dan pelanggaran HAM.[7]

Agar dapat berlaku secara implementatif, prinsip-prinsip dalam penerapan pendekatan jurnalisme berbasis HAM mengacu pada lima prinsip, yakni keterkaitan dengan standar HAM, partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi dan pemberdayaan.[8] Berikut ini, merupakan elaborasi atas ke-5 prinsip yang dimaksud:

Prinsip	Penjelasan
Keterkaitan dengan standar HAM	Pendekatan hak asasi manusia dikaitkan dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional, yang mengelaborasi standar minimum yang

7 Ibrahim S. Shaw, Human Rights Journalism: Advances in Reporting Distant Humanitarian Interventions, UK: Palgrave Macmillan, 2012.

8 5 prinsip tersebut merupakan formulasi dari The human rights-based approach Training Manual (Beman and Calderbank, 2008) yang diterbitkan di Bangkok tahun 2008 oleh UNESCO.

Prinsip	Penjelasan
	diperlukan untuk menghormati dan memenuhi hak asasi manusia. Konvensi, perjanjian, deklarasi, dan laporan hak asasi manusia internasional adalah pedoman yang menentukan apa itu HAM dasar dan apakah suatu negara memenuhi hak-hak tersebut. Saat meliput masalah sosial (saya akan menambahkan politik, ekonomi dan budaya), jurnalis harus mengacu pada konvensi hak asasi manusia yang telah ditandatangani oleh pemerintah di negara mereka dan laporan PBB tentang apakah negara tersebut memenuhi hak-hak ini untuk mendapatkan pemahaman yang baik dari beberapa isu hak asasi utama di negara tersebut. Pertanyaan reflektif: *Apakah HAM, baik sebagai subjek akademik (academic subject) atau aspek dari subjek akademik, ditautkan (embedded) dalam kurikulum pembelajaran atau program pelatihan jurnalis?*

Prinsip	Penjelasan
Partisipasi	Pendekatan berbasis hak asasi manusia memerlukan tingkat partisipasi yang tinggi dari semua pihak yang terkena dampak, baik dari individu, laki-laki dan perempuan, komunitas, masyarakat sipil, penduduk asli dan lain-lain. Partisipasi yang dimaksud harus bersifat aktif bebas dan bermakna. Sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan pada Konferensi Wina tahun 1986 bahwa partisipasi harus 'aktif, bebas dan bermakna', sehingga kontak formal atau 'seremonial' dengan penerima manfaat saja tidak cukup. Partisipasi masyarakat yang paling tertinggal dan terpinggirkan harus selalu menjadi prioritas. Pertanyaan reflektif: 1. *Dalam konteks modul ini yang ditujukan untuk peliputan isu keagamaan yang inklusif, damai dan toleran. Apakah praktik jurnalisme telah mengakomodir suara-suara dari kelompok minoritas agama dan kepercayaan? Baik dalam perencanaan maupun aktivitas peliputan?*

Prinsip	Penjelasan
	2. Apakah produk-produk jurnalistik telah mampu memproduksi kontra-narasi terhadap bias dan mispersepsi terhadap kelompok minoritas agama dan kepercayaan?
Akuntabilitas	Pendekatan berbasis hak asasi manusia mengidentifikasi "pemegang hak *(rights holders)*", serta "pengemban tugas *(duty bearers)*, untuk menyoroti siapa yang memiliki tanggung jawab/ pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa hak dari rights holders direalisasikan. Prinsip ini membantu dengan berfokus pada peningkatan kapasitas para pengemban tugas, termasuk pemerintah, individu, organisasi dan otoritas lokal, perusahaan swasta, donor bantuan dan lembaga internasional, untuk memenuhi kewajiban mereka. Sebagaimana dicatat dalam hukum hak asasi manusia, *duty bearer* memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak-hak sosial, budaya dan ekonomi secara progresif.

Prinsip	Penjelasan
	Pertanyaan reflektif: *Apakah dalam mengemban tugas, jurnalis telah menitikberatkan pada pertanyaan "mengapa" peristiwa itu terjadi dan tidak hanya memahami 'bagaimana', 'kapan', 'di mana' dan 'apa' dari peristiwa, masalah dan proses?*
Non-diskriminasi	Persyaratan hak asasi manusia untuk non-diskriminasi menuntut agar fokus secara khusus ditekankan pada status kelompok rentan, seperti minoritas, masyarakat adat, kelompok miskin, dalam konteks pendekatan berbasis hak. Agar berhasil mematuhi prinsip ini, sangat diperlukan data terpilah berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, etnis, bahasa, dan bidang terkait lainnya yang menjadi perhatian dalam hak asasi manusia. Dalam menjalankan prinsip ini, seorang jurnalis harus memasukkan perlindungan untuk melindungi dari ancaman terhadap hak-hak dan kesejahteraan kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan ini, sambil menjaga agar tidak memperkuat ketidakseimbangan kekuatan yang ada.

Prinsip	Penjelasan
	Pertanyaan reflektif: Apakah sumber informasi (narasumber) dan proses wawancara terhadap kelompok minoritas agama dan kepercayaan dalam penulisan liputan, telah mampu mencegah ketidakseimbangan kekuatan dalam perang narasi yang terjadi? Apakah jurnalis dan redaksi media, telah mempertimbangkan dampak terhadap posisi kelompok minoritas agama dan kepercayaan terhadap peliputan yang dilakukan?
Pemberdayaan	Pendekatan berbasis hak asasi manusia mensyaratkan bahwa intervensi berkontribusi pada peningkatan kapasitas pemegang hak untuk mengklaim dan melaksanakan hak mereka. Pemegang hak harus ditempatkan di tengah-tengah proses. Dalam melaporkan masalah apa pun, proses wawancara dan pelaporan harus, jika memungkinkan, memberikan suara kepada yang terpinggirkan, memungkinkan mereka untuk mengungkapkan keprihatinan atau kebutuhan mereka dalam lingkungan yang aman.

Prinsip	Penjelasan
	Pertanyaan reflektif: Apakah jurnalis dan redaksi media, telah membangun semacam simpul dan sistem deteksi dini, yang ketika suatu masalah muncul, mereka dapat langsung menemui jurnalis yang akan mendukung mereka untuk membuat publik mengetahui masalah?

PRAKTIK PEMBELAJARAN

METODE:
Curah Pendapat

ALUR PELAKSANAAN:

1. Fasilitator membagi peserta kedalam 5 kelompok, dengan masing-masing kelompok berjumlah 6 orang
2. Setiap kelompok diminta untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dalam internal redaksi media mereka sendiri ataupun media secara umum, dan dituangkan pada kertas plano, mengacu pada kisi-kisi pertanyaan di bawah.
3. Setiap kelompok diberi waktu 30 Menit untuk mendiskusikan jawaban.
4. Presentasi dari masing-masing kelompok
5. Diskusikan bagaimana kondisi penerapan prinsip "jurnalisme berbasis HAM" pada media di Indonesia secara umum, dan terkhusus pada redaksi media saudara?

Curah Pendapat
Anggota Kelompok: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Prinsip	Pertanyaan Reflektif	Kondisi Eksisting	Faktor Penyebab
Keterkaitan dengan standar HAM	Apakah HAM, baik sebagai subjek akademik (academic subject) atau aspek dari subjek akademik, ditautkan (embedded) dalam kurikulum pembelajaran atau program pelatihan jurnalis?	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.

Prinsip	Pertanyaan Reflektif	Kondisi Eksisting	Faktor Penyebab
Partisipasi	Apakah praktik jurnalisme telah mengakomodir suara-suara dari kelompok minoritas agama dan kepercayaan? Baik dalam perencanaan maupun aktivitas peliputan? Apakah produk-produk jurnalistik telah mampu memproduksi kontra-narasi terhadap bias dan mispersepsi terhadap kelompok minoritas agama dan kepercayaan?		
Akuntabilitas	Apakah dalam mengemban tugas, jurnalis telah menitikberatkan pada pertanyaan “mengapa” peristiwa itu terjadi dan tidak hanya memahami 'bagaimana', 'kapan', 'di mana' dan 'apa' dari peristiwa, masalah dan proses?		

Prinsip	Pertanyaan Reflektif	Kondisi Eksisting	Faktor Penyebab
Non-Diskriminasi	Apakah sumber informasi (narasumber) dan proses wawancara terhadap kelompok minoritas agama dan kepercayaan dalam penulisan liputan, telah mampu mencegah ketidakseimbangan kekuatan dalam perang narasi yang terjadi? Apakah jurnalis dan redaksi media, telah mempertimbangkan dampak terhadap posisi kelompok minoritas agama dan kepercayaan terhadap peliputan yang dilakukan?		
Pemberdayaan	Apakah jurnalis dan redaksi media, telah membangun semacam simpul dan sistem deteksi dini, yang ketika suatu masalah muncul, mereka dapat langsung menemui jurnalis		

Prinsip	Pertanyaan Reflektif	Kondisi Eksisting	Faktor Penyebab
	yang akan mendukung mereka untuk membuat publik mengetahui masalah?		

2.2. JURNALISME DAN KEBEBASAN BERAGAMA/ BERKEYAKINAN (KBB)

Studi global yang dilakukan oleh The Pew Research Center tentang pembatasan aktivitas dan kegiatan keagamaan menemukan bahwa sekitar lima miliar orang, 75 persen populasi dunia, tinggal di negara-negara dengan tingginya pembatasan kegiatan dan aktivitas keagamaan oleh pemerintah maupun negara-negara dengan tingkat konflik sosial keagamaan yang tinggi. Seringkali yang menjadi target merupakan kalangan dari kelompok agama minoritas.[9] Simultan dengan temuan global tersebut, studi SETARA Institute tentang situasi KBB di Indonesia menyimpulkan bahwa dalam periode tahun 2007 hingga 2020 terjadi sebanyak 2.713 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Bahkan dalam dua tahun terakhir, 2021 dan 2022 tren peningkatan kasus pelanggaran KBB masih sama. Pada 2021, SETARA mencatat 171 peristiwa dengan 318 tindakan, sedangkan 2022, tercatat terjadi 175 peristiwa pelanggaran KBB dengan 333 tindakan. Konvergen dengan studi The Pew Research Center, temuan SETARA

9 "Rising Tide of Restrictions on Religion," September 2012, Pew Research Center.

terkait pelanggaran KBB di Indonesia juga menemukan kelompok minoritas agama, yakni Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai korban pelanggaran terbanyak.[10]

Media-dalam semua bentuk, termasuk media cetak, audiovisual dan elektronik-, jika tidak berhati-hati dalam bertindak, justru dapat menjadi aktor yang memicu tingginya friksi sosial yang menyasar kelompok-kelompok agama di seluruh dunia. Media dengan kemampuan menciptakan dan membentuk persepsi publik, pada aktualisasinya, berpotensi memproduksi pemberitaan yang sarat akan propaganda, bias, stereotip, miskonsepsi, kesalahpahaman dan hasutan kebencian (hate speech) terhadap kelompok-kelompok agama. Pada 2017, Kemenkominfo RI mencatat terdapat 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (hate speech). Kemudian pada studi yang berbeda, mengacu analisis konten pemberitaan yang dilakukan Remotivi yang bekerja sama dengan International Media Support (IMS) terhadap media daring dan televisi (Komunitas Agama Marginal dalam Media di Indonesia: Sebuah Kajian Awal, 2021) maupun riset UNTAR-SEJUK-Kemenristekdikti (2017-2019), keduanya sama-sama menyimpulkan bahwa liputan isu keberagaman tidak banyak mewakili suara-suara kelompok rentan.

Pada prinsipnya, kerja-kerja jurnalisme bertitik anjak pada nilai-nilai tentang kebenaran, kemandian, akurasi, keadilan, keseimbangan, penghormatan terhadap privasi, dan

10 Syera A. Buntara, Siaran Pers SETARA Institute: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) 2022, SETARA Institute, 31 Januari 2023.

komitmen untuk meminimalkan kerugian, sebagaimana yang tertulis pada nilai-nilai dasar kode etik jurnalisme di seluruh dunia. Meskipun pada saat yang sama, meliput cerita yang melibatkan konteks agama memiliki tantangan yang kompleks, oleh karenanya, jurnalis dituntut untuk memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran penuh akan tanggung jawab sosial untuk menghindari mengobarkan ketegangan atau memicu konfrontasi dan intoleransi.

Prakondisi mendasar yang mesti dipahami jurnalis sebelum menulis pemberitaan tentang isu keagamaan, adalah dengan terlebih dahulu menekankan penulisan pada nilai-nilai kemanusiaan universal dan penalaran moral, yang tetap terletak di dalam konteks, namun terus berupaya untuk melampaui kaidah dan teknis mendasar, disertai pengorbanan untuk menggali sumber informasi yang benar-benar mampu menguatkan isi cerita. Untuk sampai pada logic demikian, diperlukan perubahan dengan konsekuensi profesional dan sosial yang signifikan.

Sebagai rujukan bagi jurnalis dalam peliputan isu keagamaan, terutama dalam konteks KBB, charter on Journalistic Ethics in Relation to Respect for Religion or Belief dapat menjadi rujukan dan kaidah bagi jurnalis dalam peliputan isu-isu keagamaan dan KBB.[11]

11 Anonymous, What is Freedom of Religion? Know Your Rights, Prepared by Church of Scientology International, 2017.

Prinsip	Kriteria
Integritas dan Akuntabilitas	• Jurnalis bertanggungjawab atas konsekuensi sosial dan politik dari kerja mereka, dan berkewajiban untuk menjaga standar etika dan profesionalitas • Jurnalis harus dengan teliti berusaha melaporkan kebenaran; menghormati hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran; memastikan bahwa setiap informasi yang mereka sebarkan bersifat adil dan objektif; segera dan dengan jelas mengoreksi ketidakakuratan materi apa pun; dan memberikan hak jawab dengan cara yang tepat • Media bertanggung jawab atas materi apa pun yang dirilis melalui kanal perilisan mereka.
Kebebasan Berekspresi dan Pertanggung-jawaban etis	• Media yang bertanggung jawab mengakui pentingnya kebebasan informasi dan dampaknya terhadap pembentukan persepsi publik. • Media yang bertanggung jawab memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan dan mengomentari semua masalah kepentingan publik sehubungan dengan hak dan kebebasan individu dan institusi.

Prinsip	Kriteria
	• Media yang bertanggung jawab secara bebas mengekspresikan pendapat pribadi atau kelompok dalam batas-batas konteks ide yang pluralistik. • Media yang bertanggung jawab menghormati standar etika dan moral yang berlaku dan menghindari menjadi promotor narasi yang bersifat merendahkan • Media yang bertanggung jawab memupuk hak publik untuk mengetahui dan hak atas kebebasan berekspresi. • Media yang bertanggung jawab mengupayakan perdamaian, demokrasi, kemajuan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. • Media yang bertanggung jawab melakukan upaya sungguh-sungguh untuk mengurangi ketidaktahuan, mempromosikan pemahaman yang lebih besar, mengurangi ketidakpekaan budaya dan agama di antara masyarakat, dan memfasilitasi dialog antar bangsa. • Media yang bertanggung jawab memastikan bahwa tampilan dan penyebaran gambar mematuhi persyaratan yang sama dan standar etika tertinggi seperti untuk presentasi tertulis atau lisan.

Prinsip	Kriteria
Diskriminasi atas dasar agama dan Pertanggung-jawaban etis	• Media yang bertanggung jawab berfungsi sebagai pengawas untuk melindungi hak-hak fundamental. • Media yang bertanggung jawab menghindari referensi yang diskriminatif atau merendahkan keyakinan agama dan nilai-nilai spiritual. • Media yang bertanggung jawab tidak mengacu pada agama atau lembaga keagamaan dalam konteks yang merugikan, bias, atau merendahkan • Media yang bertanggung jawab menahan diri dari menafsirkan kembali, salah menafsirkan, menganalisis, menilai atau memeriksa keyakinan agama atau ekspresi dari keyakinan tersebut. • Media yang bertanggung jawab tidak mengganggu hal-hal sakral yang berkaitan dengan akidah, ritus keagamaan, dan lembaga keagamaan. • Media yang bertanggung jawab memberikan kesempatan yang adil dan cepat untuk menjawab ketidakakuratan dan stereotip mengenai organisasi keagamaan atau anggota yang terkena dampak ketika diminta secara wajar.

Prinsip	Kriteria
	• Media yang bertanggung jawab menghindari stereotip agama dan tidak mengaitkan agama atau kepercayaan apa pun dengan pelanggaran hak asasi manusia atau terorisme. • Media yang bertanggung jawab menyeimbangkan hak asasi manusia yang mendasar, termasuk hak untuk bebas dari diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan, dengan hak atas kebebasan berekspresi dan hak publik untuk mengetahui.
Hasutan dan pertanggung-jawaban etis	• Media yang bertanggung jawab tidak pernah mempromosikan kebencian agama. • Media yang bertanggung jawab menahan diri dari memprovokasi agresi, kebencian, diskriminasi, dan segala bentuk kekerasan yang ditujukan kepada individu dan organisasi karena keyakinan dan asosiasi agama mereka. • Media yang bertanggung jawab menghindari menghasut kekerasan yang dapat diperkirakan, mengobarkan kebencian, menstigmatisasi agama dan pengikutnya, dan menimbulkan ketidaksetaraan atas dasar agama atau kepercayaan.

PRAKTIK PEMBELAJARAN

METODE: DISKUSI KOLABORATIF
ALUR PELAKSANAAN:

1. Fasilitator membagi peserta kedalam 5 kelompok, dengan masing-masing kelompok berjumlah 6 orang
2. Setiap kelompok diminta untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dalam internal redaksi media mereka sendiri ataupun media secara umum, dan dituangkan pada kertas plano, mengacu pada lembar keterpenuhan prinsip dan kriteria pemberitaan KBB di Bawah
3. Setiap kelompok diminta memberi *"Cheklist":* ✔, pada prinsip yang terpenuhi. Sebaliknya memberi tanda ✘, pada prinsip yang tidak terpenuhi.
4. Setiap kelompok diberi waktu 30 Menit untuk mendiskusikan jawaban.
5. Presentasi dari masing-masing kelompok

Diskusi Kolaboratif			
Anggota Kelompok: 1. 2. 3. 4. 5. 6.			
Prinsip	**Kriteria**	**Justifikasi**	**Rekomendasi tindak lanjut**
Integritas dan Akuntabilitas	Mis: 1. ✔ 2. ✘ 3. ✔		
Kebebasan Berekspresi dan Pertanggungjawaban etis			
Diskriminasi atas dasar agama dan Pertanggungjawaban etis			
Hasutan dan pertanggungjawaban etis			

2.3. JURNALISME BERPERSPEKTIF GENDER

Menurut teoritikus marxis, sebagian besar teks media memuat pandangan yang "populis" atau "dominan." Dalam operasionalisasi, media berfungsi memperkuat perspektif arus utama dengan menggunakan idiom publik, dengan maksud agar klaim menyuarakan opini publik semakin kokoh dan absolut.[12] Berdasarkan laporan Global Media Monitoring Report tahun 2011, menemukan bahwa kaum lelaki mendominasi posisi penting sebagai penentu kebijakan dan pucuk pimpinan manajemen media di tujuh kawasan dengan persentase masing-masing 74,1 persen dan 72,7 persen. Sementara itu, berdasarkan penelitian Global Monitoring Project tahun 2015, menyimpulkan bahwa 76 persen pembaca berita adalah kaum laki-laki.[13] Sebagaimana tercermin dalam fakta pemberitaan media, realitas yang ditunjukkan tampak sangat maskulin.

Lebih lanjut, Global Media Monitoring Project juga menemukan bahwa hanya 24% berita yang berfokus pada perempuan, sedangkan 76% tentang laki-laki (Macharia, 2020). Menurut penelitian ini, suara perempuan paling banyak terdengar dalam berita yang berhubungan dengan kesehatan atau sains (35%), tetapi paling sedikit digunakan dalam berita tentang politik atau pemerintahan (16%). Ketika perempuan digunakan sebagai sumber berita, mereka lebih

12 Christina Chan-Meetoo, Gender Sensitive Reporting, University of Mauritius, Januari 2013.

13 Ammu Joseph et. al., Indikator Sensitif Gender untuk Media: Kerangka Indikator Mengukur Sensitivitas Gender pada Organisasi dan Konten Media, terj, Bonardo M. Wahono, Jakarta: AJI Indonesia, 2015.

cenderung menyajikan pengalaman individu (38%) daripada kepakaran tentang topik tersebut (19%) (Geertsema Sligh, 2019). Laki-laki seringkali digambarkan sebagai pribadi yang aktif, tangguh, tidak emosional, agresif dan kompetitif, sedangkan perempuan digambarkan sebagai makhluk yang pasif, emosional, sensitif, penurut dan tidak kompeten (e.g., Furnham, Mak, & Tanidjojo, 2000).

Mempertimbangkan situasi struktural dan kultural pada ranah media, maka dibutuhkan peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang isu-isu gender secara umum untuk memahami bagaimana menghindari pemberitaan bias gender dan memastikan lebih banyak perhatian terhadap keseimbangan gender dalam pemberitaan dan peliputan media. Konsep jurnalisme berperspektif gender sendiri, dapat dimaknai sebagai praktik jurnalisme yang inklusif dalam konteks keberagaman gender, menyuarakan pemenuhan hak-hak perempuan dan kelompok rentan, mengadvokasi dan menyebarluaskan praktik-praktik pelanggaran maupun pemenuhan hak, serta berupaya penuh untuk menghindarkan dari praktik diskriminasi.[14]

Terdapat 4 variabel yang mesti dipenuhi dalam mewujudkan jurnalisme berperspektif gender:[15]

14 Cicek Tahaoglu dan Elif Akgul, Gender-Based Journalism Handbook, IPS Communication Foundation Publications, 2018.

15 Anita Ramsak, Guidelines for Gender Sensitive Reporting, Institut Zavajnu Politiku with support from Ministry of Foreign Affairs Republic of Slovenia, Juni, 2017.

Variabel	Kondisi
Pemilihan narasumber dan cerita yang ditujukan untuk keseimbangan presensi antara perempuan dan laki-laki di media	Minimnya peliputan tentang gender atau hak-hak perempuan, seperti pada kasus kekerasan berbasis gender membuat cerita-cerita tersebut, meskipun seringkali merupakan pengalaman perempuan (dan laki-laki), hampir tidak terlihat atau tidak ada. Oleh karena itu, sangat penting untuk bekerja menuju liputan yang adil atas isu-isu nyata, yang penting bagi perempuan dan yang menyajikan pengalaman mereka secara adil.
Penggambaran yang adil tentang perempuan dan laki-laki melalui penghapusan stereotip.	Peran media yang sangat vital dalam membentuk persepsi publik, oleh karenanya penting untuk menghindari segala bentuk stereotip gender
Menggunakan bahasa yang adil gender	Untuk benar-benar setara, perempuan dan laki-laki harus dilihat dan didengar secara setara pula, termasuk menghilangkan penggunaan bahasa yang misinterpretasi, berpotensi mengecualikan atau menyinggung perempuan. Penggunaan bahasa dan gambar yang hati-hati di media akan memberikan refleksi yang lebih akurat terhadap audiens atau pembaca, yang secara positif dapat mempengaruhi kesadaran orang dari waktu ke waktu.

Variabel	Kondisi
Membangun kesetaraan gender dalam organisasi media.	Fakta masih dominannya peran laki-laki dan pandangan maskulinitas pada level manajemen dan decision making media, maka dibutuhkan upaya untuk menyeimbangkan representasi wanita dan pria dalam hal kepemilikan, manajemen, dan board position, mengembangkan kebijakan/kode etik tentang kesetaraan gender dan kebijakan kesetaraan gender pada HRD, membentuk divisi gender mainstreaming, dan peningkatan kapasitas yang ditujukan secara khusus pada perempuan dan isu kesetaraan gender..

PRAKTIK PEMBELAJARAN

METODE: DISKUSI KOLABORATIF
ALUR PELAKSANAAN:

1. Fasilitator membagi peserta kedalam 5 kelompok, dengan masing-masing kelompok berjumlah 6 orang
2. Setiap kelompok diminta untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dalam internal redaksi media mereka sendiri ataupun media secara umum, dan dituangkan pada kerta plano, mengacu pada kisi-kisi pertanyaan di bawah.
3. Setiap kelompok diberi waktu 30 Menit untuk mendiskusikan jawaban.
4. Presentasi dari masing-masing kelompok
5. Diskusikan bagaimana kondisi pengarusutamaan gender pada media di Indonesia secara umum, dan terkhusus pada redaksi media saudara, menggunakan 4 variabel di atas? Tentukan strategi apa yang akan ditempuh untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi?

Diskusi Kolaboratif			
Anggota Kelompok: 1. 2. 3. 4. 5. 6.			
Variabel	**Kondisi Eksisting**	**Strategi**	**Aktivitas/ program intervensi**
Presensi keseimbangan pemberitaan dan pilihan narasumber antara laki-laki dan perempuan			
Stereotip gender dalam pemberitaan			
Pemilihan dan penggunaan diksi dan bahasa yang ramah gender			
Kondisi kesetaraan gender dalam struktur dan organisasional media			

2.4. JURNALISME BERPERSPEKTIF MINORITAS

Secara operasionalisasi, konten media kontemporer telah beranjak untuk mulai menitikberatkan pada kompleksitas peliputan ras, imigran, dan keragaman budaya. Menurut beberapa metrik, liputan pers tentang kelompok dan masalah ras dan etnis telah meningkat. Meskipun, di sisi lain, praksis peliputan media terhadap kelompok minoritas masih memunculkan stereotip terhadap mereka. Sebagaimana dibahas sebelumnya, mengenai aspek penting dalam jurnalisme inklusif, salah satu upaya potensial untuk meningkatkan liputan tentang kelompok minoritas dan berbagai permasalahan terkait adalah dengan peningkatan keragaman di ruang redaksi (Grose, 2006; Mills, 1997; Pritchard & Stonbely, 2007). Jumlah keterwakilan kelompok minoritas pada ruang redaksi masih sangat rendah jika dibandingkan dengan keseluruhan populasi negara (Gold, 2013; Pew Research Center, 2014). Padahal, keragaman dalam struktur manajemen redaksi, terutama pada latar belakang jurnalis selaku pewarta berita akan mempengaruhi liputan berita kampanye tentang isu-isu rasial, yaitu isu-isu kebijakan atau sosial yang sering dikaitkan dengan kelompok rasial melalui komunikasi politik dan media? Banyak masalah kebijakan sekarang "diresapi dengan isyarat kelompok simbolik"

Ada sejumlah alasan untuk menghubungkan jurnalis dari kalangan minoritas dengan liputan intensif tentang isu-isu terkait kelompok minoritas. Pertama, latar belakang kelompok minoritas merupakan faktor penentu penting dalam pemilihan berita (Husband, 2005; Pritchard & Stonbely, 2007; Tolley, 2015). Hal ini konsisten dengan

kebijaksanaan konvensional bahwa karakteristik individu dapat mempengaruhi pemilihan berita oleh wartawan (Craft & Wanta, 2004; McGowan, 2001; Shoemaker & Reese, 2014) sehingga wartawan minoritas lebih cenderung untuk meliput isu-isu yang berkaitan dengan orang dari latar belakang etnis yang sama. Kedua, karena keterlibatan aktif dengan komunitas etnis, jurnalis minoritas terkadang lebih mengetahui apa yang terjadi di antara populasi etnis; dan mereka juga tahu di mana dan bagaimana mencari tahu masalah tersebut (Mills, 1997). Hal ini mengurangi biaya untuk mencari berita tentang isu-isu terkait minoritas, menjadikan berita terkait ras sebagai hal rutin bagi reporter minoritas, terutama di bawah tekanan tenggat waktu yang ketat.

Media komunitas adalah organisasi masyarakat sipil, biasanya terdaftar sebagai badan hukum, yang menawarkan dan mendorong partisipasi di berbagai tingkatan struktur mereka. Disebut juga sebagai sektor media ketiga, media komunitas memiliki identitas yang jelas berbeda di samping media layanan publik nasional dan media komersial swasta.

Sebagai media yang berasal dari lokal yang menggunakan struktur produksi horizontal, proyek media komunitas juga mempromosikan fungsi-fungsi penting termasuk "kualitas dan manajemen relawan, kapasitas pelatihan sektor dan sifat dari berbagai jaringan di mana penyiaran komunitas menjadi bagiannya".6 (Van Vuuren, 2006 hal.390) Media komunitas dipahami dalam bentuk proyek penyiaran dan/atau multimedia yang memiliki beberapa karakteristik

berikut: kemandirian dari pemerintah, lembaga komersial dan keagamaan, dan partai politik; orientasi nirlaba; partisipasi sukarela anggota masyarakat sipil dalam merancang dan mengelola program; kegiatan yang bertujuan untuk keuntungan sosial dan keuntungan masyarakat; kepemilikan oleh dan akuntabilitas kepada komunitas lokal dan/atau komunitas kepentingan yang mereka layani; komitmen terhadap praktik-praktik inklusif dan antarbudaya.

Dalam selebaran baru-baru ini tentang media komunitas (2019), Dewan Eropa mengakui peran penting media komunitas dalam melindungi hak mendasar atas kebebasan berekspresi dan informasi dan mengakui kontribusi media komunitas yang terorganisir dari bawah ke atas dalam menambah sifat pluralistik lanskap media lokal serta mendorong keragaman dan dialog. (Dewan Eropa 2019). Dalam Rekomendasi tentang pluralisme media dan transparansi kepemilikan media (2018), negara-negara anggota didorong untuk mendukung pembentukan dan fungsi media komunitas minoritas, regional, lokal, dan nirlaba, termasuk dengan menyediakan mekanisme keuangan untuk mendorong perkembangan mereka.

Media komunitas ditempatkan secara unik untuk mengawinkan dua tujuan yaitu mempromosikan pluralisme media dan memupuk literasi media dengan memberikan keterampilan media digital dan pelatihan jurnalistik etis kepada berbagai usia, bahasa, dan kelompok minoritas, termasuk orang-orang dengan kebutuhan khusus.

Rekomendasi yang muncul dari Seminar Internasional 2015 tentang Keberlanjutan Media Komunitas: Penguatan

Kebijakan dan Pendanaan menyerukan kepada Penyiar Komunitas dan Asosiasi mereka untuk "berkolaborasi dengan aktor lain untuk mempromosikan literasi media dan informasi, untuk memerangi kebencian dan xenofobia, untuk berkontribusi pada budaya toleransi, dan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya dan peran media komunitas dalam komunitas target mereka". (UNESCO 2015, hal.3)

2.5. NARASI ALTERNATIF DALAM PRAKSIS JURNALISME

Maraknya platform digital dan media sosial telah mengubah sektor media dan memengaruhi narasi mana yang diedarkan secara luas dan cara penyebarluasannya. Menurut BNPT, dalam kondisi ini, upaya kelompok teror untuk menyebarkan propaganda, rekrutmen, dan pendanaannya semakin masif di dunia maya. Hal ini dipengaruhi oleh evolusi teknologi informasi dan media sosial Terkait konten radikalisme dan terorisme yang telah menyebar di internet, Kominfo sejak 2017 hingga Juli 2020 telah memblokir 16.739 konten. Konten yang paling banyak diblokir ada di Facebook dengan 11.600 konten. Kemudian Twitter 2.282 konten, website 496 konten, Youtube 678 konten, dan File-sharing sekitar 1.000 konten. Internet dan media sosial menjadi pilihan strategis bagi kelompok radikal dan teroris sebagai saluran untuk menyebarkan pesan propaganda dan radikalismenya. Kelompok radikal dan teroris dapat memahami tren dalam kehidupan manusia. Mereka menggunakan internet sebagai alat propaganda yang efektif untuk mendapatkan

dukungan dari para simpatisan. Selain itu, jaringan internet juga dapat menggantikan peran media arus utama yang tidak dimiliki oleh kelompok radikal-teroris.[16]

Narasi adalah cerita yang diceritakan kelompok tentang asal usul, identitas, dan kepercayaan mereka sendiri maupun orang lain. Pada tingkat individu, narasi merupakan kisah hidup dan pengalaman yang membantu seseorang mendapatkan makna dari kehidupan sehari-hari. Pada tingkat kolektif, narasi berhubungan dengan interpretasi peristiwa sejarah dan pengalaman bersama, menggunakan bahasa tertentu untuk membentuk sistem kepercayaan kelompok dan identitas bersama yang dibangun secara simbolis. Namun, di sisi lain, narasi juga dapat meningkatkan polarisasi dengan melemahkan kepercayaan yang telah dikonstruksi secara sosial, hingga mendorong terjadinya kekerasan. Berbagai pemangku kepentingan – terutama elit dan institusi politik dan sosial – menggunakan narasi untuk mengejar tujuan mereka sendiri, dan seringkali memiliki insentif untuk menyebarkan narasi yang memecah belah yang mengamankan pengaruh mereka. Narasi yang memecah belah menyoroti pembenaran dan validasi atas kerisauan satu kelompok, sembari membangun argumentasi bahwa "pihak lainlah" yang justru memicu terjadinya konflik.

Di tengah, perang narasi di media yang perlahan diinjeksi oleh perspektif dan pemahaman yang kontra terhadap pandangan keagamaan yang inklusif, toleran dan dami, dibutuhkan narasi alternatif agar persepsi publik atau pembaca

16 Athik H. Ummah, Digital Media and Counter-Narrative of Radicalism, Jurnal Theologia, Vol. 31, No.2, Desember 2020.

tidak larut ataupun justru terjerumus dengan paham-paham radikal, eksklusif, dan intoleran. Secara definisi, narasi alternatif adalah narasi positif, pluralis atau progresif berdasarkan prinsip antar budaya dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di masa berita palsu, polarisasi, ujaran kebencian, dan wacana yang memecah belah, narasi alternatif merupakan alat yang ampuh untuk membantu kelompok rentan dan minoritas keagamaan untuk angkat bicara dan menceritakan kisah mereka. Kisah-kisah ini harus dikomunikasikan secara inklusif, menggunakan bahasa yang mencakup dan menjangkau semua orang, terlepas dari perbedaan mereka.[17] Narasi alternatif dalam konteks berbeda dapat menjadi kontra-wacana (counter-discourse) yang berlaku untuk semua jenis wacana yang secara simbolis atau efektif menolak dinamika pengetahuan dan kekuasaan yang divalidasi dalam wacana media yang dominan. Tidak hanya sekadar menyajikan perspektif yang berbeda dari arus utama, kontra-wacana dipandang sebagai kontestasi atas wacana, yang dalam konteks modul ini merupakan adalah wacana keagamaan yang radikal, eksklusif, dan intoleran, sehingga bertujuan untuk menantang dinamika narasi/ wacana yang diproduksi oleh kelompok-kelompok tersebut.

Modul ini menyediakan opsi langkah dalam membendung dan mengatasi narasi-narasi yang cenderung memecah belah, radikal, eksklusif dan intoleran. Setidaknya ada 5 langkah yang dapat ditempuh untuk menjaga lanskap narasi yang kaya dan beragam di media, (1) pelatihan dan edukasi,

17 https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/alternative-narratives-and-inclusive-communication

(2) kolaborasi dan dialog, (3) verifikasi, (4) pendanaan, dan (5) regulasi. Premisnya adalah bahwa ketika masyarakat memiliki beragam media yang menyebarkan konten yang akurat dan mengamplifikasi banyak cerita yang beragam dan kompleks, hal ini akan menghasilkan lanskap naratif yang kaya yang mendorong keterlibatan di antara kelompok dan institusi sosial yang berbeda, sehingga perang narasi ataupun wacana akan dapat dikelola secara konstruktif.

Langkah	Indikator Implementasi
Pelatihan dan pendidikan	Pelatihan dan pendidikan, akan fokus pada mempelajari: 1. Penguatan kampanye informasi untuk masyarakat umum tentang apa itu narasi, bagaimana narasi itu dimobilisasi oleh berbagai aktor, dan peran monetisasi dan model bisnis media baru dalam membentuk konten yang dilihat dan dibagikan orang. Kampanye ini juga dapat mencakup cara mengidentifikasi berita palsu, disinformasi, dan misinformasi, termasuk melalui penggunaan alat dan aplikasi online yang melacak manipulasi informasi. 2. Pelatihan menekankan komponen tentang mengapa dan bagaimana berbagai aktor menggunakan media untuk mempromosikan polarisasi dan

Langkah	Indikator Implementasi
	disinformasi, serta bagaimana bias yang tidak disadari memengaruhi cara kita mengonsumsi konten media 3. Memperluas program literasi media dan informasi di sekolah, komunitas dan organisasi masyarakat, dan pemuda. 4. Membangun dan mempublikasikan situs web dan forum virtual 5. Mereintordusir kegiatan pemagangan di *outlet* media tradisional 6. Mempromosikan kesempatan belajar untuk berbagai jenis produksi konten
Kolaborasi dan Dialog	Melalui kolaborasi dan dialog, *outlet* media dan produser konten dapat: 1. Menyelenggarakan serangkaian dialog dan debat publik – di tingkat komunitas, subnasional atau nasional terkait narasi-narasi bias dan peran media dalam membangun narasi alternatif 2. Membangun sebuah asosiasi media dan jurnalis profesional pada tingkat nasional, regional maupun lokal agar terus terhubung dalam membentuk ekosistem jurnalisme yang inklusif, damai, dan toleran.

Langkah	Indikator Implementasi
	3. Membangun jaringan *outlet* media kecil dan independen untuk berkolaborasi dan berbagi konten yang mendekonstruksi wacana radikal, eksklusif dan intoleran 4. Membangun jaringan *outlet* media dan jurnalis yang mewakili sisi wacana/narasi yang berbeda untuk berkolaborasi dalam memverifikasi konten dan melawan disinformasi dan misinformasi, serta mengatasi ancaman yang mungkin saja terjadi. 5. Mempromosikan kolaborasi antara redaksi media dan jurnalis dengan kelompok minoritas agama dan kelompok rentan 6. Melibatkan"'influencer" untuk membahas narasi-narasi bias serta mempromosikan narasi yang kompleks, benar dan akurat tentang kelompok agama dan kelompok rentan tertentu
Verifikasi	Verifikasi dibutuhkan untuk memastikan bahwa konten media bersifat akurat, fair, dan inklusif, yang dapat dilakukan melalui: 1. Mengadopsi, mengelaborasi, dan meningkatkan keberterimaan atas indikator produksi konten media yang akurat, adil, dan inklusif.

Langkah	Indikator Implementasi
	2. Membangun kesadaran publik untuk membantu proses penelusuran (tracking) konten dan mempublikasikan manipulasi informasi 3. Membentuk kemitraan antara redaksi media dan jurnalis dengan aktor negara, bisnis, maupun masyarakat untuk memverifikasi konten media dan menyediakan sanggahan atas narasi-narasi yang bias dan tidak benar
Pendanaan	Pendanaan merupakan aspek penting dalam mendukung upaya untuk mencapai tujuan memproduksi konten media yang akurat, fair, dan inklusif. Salah satu hal penting yang dapat diterapkan adalah menyediakan pendanaan bagi *outlet* media kecil dan independen dapat berupa *small grant,* begitupun dengan dukungan *fellowship* bagi redaksi media dan jurnalis tentang tema-tema mebangun jurnalisme yang inklusif, damai, dan toleran.
Regulasi (Peraturan)	Regulasi media adalah alat yang penting, meskipun pendekatan yang mendorong daripada meredam penceritaan lebih disukai. Di antara *outlet* swasta tradisional, media penyiaran cenderung tunduk pada regulasi undang-undang atau pengaturan bersama oleh *outlet* dan negara, sedangkan

Langkah	Indikator Implementasi
	media cetak mengandalkan pengaturan sendiri, sebagian besar melalui dewan pers. Platform media sosial juga mengandalkan mekanisme pengaturan mandiri, meskipun kebijakan moderasi dan penghapusan konten tidak memiliki standar yang jelas, kurang transparan dan cenderung reaktif daripada proaktif, serta rentan terhadap penyalahgunaan dan implementasi yang tidak merata. Metode regulasi media yang diusulkan disini berusaha untuk mengatasi beberapa kekurangan ini, dan dimaksudkan untuk melengkapi pendekatan lain, khususnya pendidikan dan kolaborasi, yang juga dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih singkat dan mungkin lebih layak dalam konteks membendung narasi-narasi bias dan disinformasi yang bersifat radikal, eksklusif, dan intoleran.

PRAKTIK PEMBELAJARAN

METODE: CURAH PENDAPAT

ALUR PELAKSANAAN:

1. Fasilitator membagi peserta kedalam 5 kelompok, dengan masing-masing kelompok berjumlah 6 orang
2. Setiap kelompok diminta untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dalam internal redaksi media mereka sendiri ataupun media secara umum, dan dituangkan pada kertas plano, mengacu pada kisi-kisi pertanyaan di bawah.
3. Setiap kelompok diberi waktu 30 Menit untuk mendiskusikan jawaban.
4. Presentasi dari masing-masing kelompok
5. Diskusikan bagaimana kondisi penerapan **"pemberitaan dan produksi konten narasi alternatif tentang membendung narasi keagamaan yang radikal, eksklusif, dan intoleran"** pada media di Indonesia secara umum, dan terkhusus pada redaksi media saudara?

Curah Pendapat	
Anggota Kelompok: 1. 2. 3. 4. 5. 6.	
Isu/Masalah	Strategi Penyelesaian (Berdasarkan 6 Indikator)
1. 2. 3. 4. 5.	

BAGIAN III

PRE-TUTORIAL ANALISIS DAN PENDALAMAN MATERI

A. PENERAPAN JURNALISME INKLUSIF

1. TEKNIK JURNALISME INKLUSIF

Toleransi beragama di Indonesia terancam oleh penyebaran paham dan ajaran agama yang disruptif melalui media. Munculnya ajaran agama yang disruptif memicu intoleransi antar umat beragama di berbagai tempat (Suryaningsi dan Solfina, 2020). Disamping itu, Godaan media dalam mengejar page views, search engine optimization, atau Google adsense membuat judul berita dan diksi yang dipilih cenderung sensasional (SEJUK, 2022). Akibatnya, tak jarang media justru menjadi pemantik dalam membentuk framing dan katalisator terhadap eksklusivitas kelompok korban atau minoritas. Hal ini dikuatkan oleh hasil riset UNTAR-SEJUK-Kemenristekdikti (2017-2019) yang menyimpulkan bahwa liputan isu keberagaman tidak banyak mewakili suara-suara kelompok rentan.

Di era disrupsi informasi, dimana masyarakat cenderung untuk mengkonsumsi berita dan informasi secara

instan, tanpa ada proses kritis, minimnya pola pikir yang eksponensial, menempatkan pandangan atas keberagaman, inklusivitas, toleransi dalam konteks keagamaan berada pada posisi perang wacana *(counter discourse)*. Kelompok moderat (jurnalis dan kelompok perempuan keagamaan), dituntut agar lebih aktif dalam memanfaatkan instrumen media digital ataupun media alternatif lainnya untuk menyebarkan pemahaman tentang keagamaan yang inklusif, damai, dan toleran, dalam membendung narasi kebencian, intoleran, eksluvitas, dan anti pada pluralisme dan keberagaman.

1.1. BAGAIMANA JURNALISME INKLUSIF DI OPERASIONALISASIKAN?

Nilai-nilai inti jurnalisme – kebenaran, kemandirian, akurasi, keadilan, keseimbangan, penghormatan terhadap privasi, dan komitmen untuk meminimalkan kerugian – tertulis dalam kode etik jurnalisme di seluruh dunia. Namun, ekspektasi dan praktik sehari-hari berbeda di dalam dan di antara ruang redaksi. Kode etik jurnalistik menginstruksikan jurnalis untuk menyadari bahaya meningkatnya diskriminasi berdasarkan agama, begitupun juga dengan latar belakang sosial, dalam pekerjaan mereka. Pada saat yang sama, meliput cerita yang melibatkan isu agama menimbulkan tantangan yang kompleks, membutuhkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran penuh akan tanggung jawab sosial untuk menghindari potensi terjadinya ketegangan atau memicu konfrontasi dan intoleransi (George 2014, p.76).

Praktik jurnalisme yang bertanggung jawab secara sosial didasarkan pada pelaporan mendalam, memberikan informasi latar belakang, menjelaskan konteks hukum,

mempertimbangkan dampaknya, memberikan suara kepada yang tidak bersuara, menunjukkan rasa hormat, meningkatkan kesadaran tentang keragaman, menghindari stereotip, mengambil sikap terhadap diskriminasi, bergerak melampaui peristiwa yang diberitakan, dan meminimalkan dampak kerugian yang mungkin akan terjadi pada korban (Winston, 2017). Contoh ini menunjukkan bahwa jurnalisme yang bertanggung jawab secara sosial memandang lokasi peristiwa (yang diliput) sebagai ruang investigasi yang mencakup pengungkapan kebenaran dan kepedulian serta memantau pihak-pihak yang berkepentingan (baik korban, maupun aktor negara lainnya) untuk terus berkontribusi pada kebaikan bersama. Pemberitaan yang baik tentang agama didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan universal dan penalaran moral.

1.2. ASPEK PENTING LIPUTAN JURNALISME INKLUSIF:

Dalam melakukan liputan terhadap isu-isu keberagaman, toleransi, inklusi, dan perdamaian pada konteks keagamaan, salah satu rujukan penting yang dapat digunakan terutama oleh Jurnalis maupun kelompok perempuan keagamaan, dapat mengacu pada Peraturan Dewan Pers No: 02/ PERATURAN-DP/XI/2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman. Pedoman ini dapat menjadi rujukan otoritatif bagi pers dalam memberitakan isu keberagaman, sehingga pemberitaan pers tidak memuat prasangka, kebencian, dan mengobarkan konflik. Dengan pedoman ini pers dapat berkontribusi bagi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

a. Pemilihan Topik Liputan
Wartawan Indonesia:

1. Mempelajari latar belakang peristiwa terkait dengan isu keberagaman.
2. Memiliki sensitivitas dan mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi ketika memberitakan isu keberagaman.
3. Menghormati kehidupan pribadi yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik.

b. Pemilihan Narasumber dalam Liputan
Wartawan Indonesia:

1. Memilih narasumber yang relevan.
2. Bersikap kritis dengan mengedepankan empati.
3. Melindungi identitas korban, pelaku, saksi, dan keluarganya.

c. Produksi Pemberitaan
Wartawan Indonesia:

1. Menghindari diksi, suara, gambar, dan grafts yang merendahkan, menghina, menampilkan stereotipe, dan menyebarkan prasangka terhadap suatu kelompok, serta mendorong kebencian dan pelabelan negatif.
2. Menjaga akurasi, melakukan verifikasi, serta keberimbangan.
3. Menghindari judul yang sensational dan provokatif, serta mempertimbangkan dampaknya.
4. Memberikan atribusi yang tepat dan relevan.

5. Menghindari kutipan yang berisi ujaran kebencian.
6. Menyebutkan keterangan waktu dan tempat yang jelas saat menampilkan materi dari arsip.
7. Menghindari kutipan yang merupakan pesan (narasi) internal suatu kelompok tanpa verifikasi.

Sejalan dengan panduan dari Dewan Pers, tahapan-tahapan dalam peliputan jurnalisme inklusif dapat diklasifikasikan ke dalam pemenuhan indikator-indikator penting berikut, agar produksi karya jurnalistik benar-benar menjadi karya yang inklusif, dan mampu menyuarakan perspektif dan pandangan kelompok minoritas atau korban.

a. Keberagaman di Ruang Media

Sebelum jauh beranjak menuju peliputan jurnalisme inklusif, ruang media mesti terlebih dahulu membangun kesadaran akan inklusivitas dari sisi internal mereka sendiri. Seringkali dalam menyusun pemberitaan tentang isu pada kelompok minoritas dan rentan, akan terjadi ambiguitas dan pandangan yang terlalu klise. Lebih jelasnya, perspektif jurnalis dalam menuliskan cerita merupakan hal yang paling krusial, dan berpotensi mendistorsi cerita yang ditulisnya. Dengan membangun keberagaman yang dimulai dari ruang redaksi media itu sendiri, potensi-potensi keberulangan narasi dan sudut pandang yang secara tidak sadar didorong oleh pandangan dominan akan dapat diminimalisir.

b. Perhatikan Bias Anda Sendiri

Sebagai jurnalis, dituntut harus mengenali bagaimana sejarah dan bias kita sendiri dapat mempengaruhi peliputan.

Untuk menyusun peliputan secara adil dan akurat, kita harus menyadarinya dan berusaha mengatasi bias tersebut, dengan. bersikap terbuka terhadap perbedaan dan pandangan dunia dari budaya lain. Hindari membuat asumsi yang salah tentang komunitas lain dengan membaca tentang masalah dan sejarah orang. Periksa cerita Anda dengan cermat untuk mencari bias. Apakah Anda melaporkan semua aspek komunitas, positif dan negatif? Apakah Anda mencari perspektif yang berbeda?

Bagian dari mitigasi bias adalah tentang mendengarkan – benar-benar mendengarkan – orang lain. Ekspos diri Anda ke komunitas dan orang-orang yang berbeda dari Anda, ajukan pertanyaan kepada mereka dan dengarkan. Cobalah untuk memahami dari mana mereka berasal. Semakin banyak pertanyaan yang Anda ajukan, cerita Anda akan semakin inklusif. Ini berlaku untuk wartawan yang bekerja di media arus utama dan media alternatif.

c. Perluas Pilihan Narasumber

Selaras dengan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Peliputan isu Keberagaman, pemilihan narasumber merupakan aspek yang paling penting dan perlu diperhatikan. Perluasan pilihan narasumber, merupakan hal yang mesti direfleksikan oleh jurnalis atau individu dalam penulisan cerita tentang sejauh mana engagement dengan komunitas-komunitas di luar dari narasumber mainstream. Jurnalis atau individu harus berupaya untuk dapat menyentuh beragam suara dari dalam setiap komunitas ataupun kelompok yang akan diberitakan.

d. Perhatikan Norma Budaya

Jurnalisme inklusif tidak hanya sekadar mencari berbagai sumber atau memastikan berbagai perspektif terakomodir dalam cerita. Jurnalisme inklusif menuntut tingkat pengetahuan dan kesadaran akan keyakinan, nilai, dan praktik budaya yang berbeda. Untuk berinteraksi secara efektif dengan orang-orang di komunitas yang berbeda, oleh karenanya, pewarta memerlukan pengetahuan yang baik tentang praktik budaya dan pandangan dunia yang berbeda.

e. Perhatikan pemilihan bahasa dan diksi

Pemilihan kata dan diksi akurat merupakan hal yang paling penting. Istilah yang Anda gunakan dapat memperkuat stereotip atau justru membantu memperbaiki atau mengubahnya. Seperti contoh, penyebutan penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan YME (Aliran Kepercayaan), seringkali media mengasosiasikan mereka dengan "agama tradisional." Istilah yang seringkali dipandang sepele, namun berdampak luas bagi pandangan terhadap mereka itu sendiri. Begitupun dengan penggunaan istilah Islam Ahmadiyah ataupun Islam Syiah, yang pada prinsipnya mereka mengasosiasikan diri sebagai Islam, tanpa ada kata tambahan.

f. Proses Wawancara (Interviewing)

Di tengah cepatnya mobilitas pemberitaan, kerja jurnalisme dalam meluangkan waktu untuk menemukan narasumber yang tepat juga menjadi satu kesulitan tersendiri. Namun, pada beberapa kelompok minoritas dan rentan pertemuan tatap muka, dan diskusi langsung merupakan satu hal sangat

penting. Pewarta akan mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat jika mengembangkan hubungan secara langsung, dan begitu sumber mengenal pewarta dengan baik, akan lebih mudah untuk menelepon mereka untuk memberikan komentar bila diperlukan.

g. Keberagaman sebagai Akurasi

Jurnalisme inklusif pada prinsipnya merupakan upaya untuk meliput seluruh cerita umat manusia dengan segala keunikan dan sudut pandang yang ada di dalamnya. Sesuai dengan pendefinisiannya, jurnalisme inklusif juga sebagai bentuk untuk menyorot kelompok-kelompok yang seringkali tidak mendapatkan tempat pemberitaan pada ruang media. Jurnalisme inklusif melaporkan secara mendalam - memberikan konteks dan menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, bukan hanya apa yang terjadi, dengan memperhatikan secara komprehensif sudut pandang yang membingkai sebuah cerita. Sehingga, dengan menempatkan konteks keberagaman dalam proses peliputan, akan dapat membantu pembaca dan orang di luar sana untuk memahami orang-orang dan dunia di sekitar mereka.

1.3. BENTUK PRODUK JURNALISME INKLUSIF

Semua tahapan dalam produksi berita menimbulkan tantangan dalam kerja jurnalisme: mulai dari menemukan topik dan mendekati sumber informasi hingga menyediakan informasi latar belakang yang diperlukan, menemukan sudut pandang, dan menyajikan sebuah cerita.

Sebagai bahan refleksi untuk mengingatkan kembali *(recall),*

bahwasanya aktivitas Jurnalistik menghasilkan beberapa karya yang mengandung informasi dengan pengemasan yang berbeda, diantaranya adalah :

a. Berita (News)

Berita adalah laporan peristiwa. Laporan lengkap sebuah peristiwa baik berbentuk tulisan, video atau suara adalah salah satu produk jurnalistik. Informasi seperti foto juga video termasuk ke dalam produk jurnalistik apabila berbentuk foto jurnalistik dan video jurnalistik. Jenis berita antara lain Berita Langsung *(straight news),* Berita Menyeluruh *(comprehensive news)*, Berita Mendalam *(Ind-depth News)*, Pelaporan Mendalam (*In-depth Reporting)*, Berita Penyelidikan *(investigative news)*, Berita Khas Bercerita *(feature news)*, Berita Gambar *(Photo News)*, dan Video Berita *(podcast/journalistic video)*

b. Opini (Views)

Opini merupakan suatu tulisan yang mengandung pendapat, penilaian, pemikiran, atau analisis mengenai suatu permasalahan atau peristiwa. Opini umumnya ditulis oleh wartawan atau orang yang kompeten dibidangnya. Jenis Opini sangat beragam, diantaranya artikel, editorial atau tajuk, kolom, karikatur, pojok, esai, ilmiah populer dan banyak lagi.

c. *Feature*

Feature adalah tulisan yang menggabungkan fakta dan opini atau tulisan khas bergaya penulisan karya sastra seperti cerpen atau novel. Jenis-jenis *Feature* antara lain Tips, Laporan Perjalanan, Biografi, Profil, Resensi, dll.

1.4. LANGKAH-LANGKAH DALAM MENERAPKAN JURNALISME INKLUSIF

Penyusunan produk jurnalisme inklusif, mesti didahului dengan memahami dan menyandarkan pada indikator berikut agar tidak terjadi bias dan mis*lead*ing dalam menghasil sebuah produk jurnalistik yang mampu menyuarakan pandangan tentang keagamaan yang toleran, damai, dan inklusif.

Ada beberapa kiat penting yang harus dipahami dalam meliput peristiwa keagamaan:

- Kenali undang-undang anti-diskriminatif, nasional dan internasional
- Dapatkan gagasan yang jelas tentang apa agama yang dominan di negara atau wilayah tersebut dan apa saja agama-agama lain.
- Perhatikan penggambaran orang yang menganut agama lain.
- Pertahankan presentasi yang adil dan seimbang dari agama dominan dan agama lain.
- Mengkontekstualisasikan konflik agama dan peristiwa terkait agama.
- Menggambarkan manusia sebagai manusia bukan perwakilan dari kelompok agama
- Hindari (dipengaruhi oleh) asumsi, stereotip, prasangka agama yang telah berkembang sebelumnya.
- Pisahkan fakta dari opini tetapi perlakukan opini sebagai hal yang relevan

2. MEMAHAMI PRODUK KARYA JURNALISME INKLUSIF

2.1 BERITA

Berita *(news)* berdasarkan batasan dari Kris Budiman adalah laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terbaru (aktual); laporan mengenai fakta-fakta yang aktual, menarik perhatian, dinilai penting, atau luar biasa (Kemdikbud, 2018). Sementara itu, dalam definisi yang lain, berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak.

A. Nilai/Unsur Berita

Penyajian sebuah berita mesti memuat nilai berita di dalamnya. Nilai berita itu mencakup beberapa hal, seperti berikut:

- Objektif : berdasarkan fakta dan tidak memihak.
- Aktual : terbaru, bukan peristiwa lama yang tidak relevan lagi *(old issue)*.
- Luar biasa : besar, aneh, janggal, dan tidak umum.
- Penting : pengaruh atau dampaknya bagi orang banyak; menyangkut orang penting/ terkenal.
- Jarak : familiaritas, kedekatan (geografis, kultural, dan psikologis).

B. Teknik Mencari Berita

Melihat, mendatangi secara langsung peristiwa atau fakta seperti :

- Mendatangi lokasi peristiwa
- Menghadiri seminar, symposium atau keterangan pers
- Mengembangkan data atau fakta yang didapat
- Mewawancarai narasumber
- Melakukan pengumpulan dan penambahan data melalui internet atau perpustakaan
- Press release

C. Teknik Penulisan Berita

- Pahami masalah
- Kumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan
- Seleksi bahan mengenai data dan informasi
- Tentukan tema pokok/Ide Cerita
- Tentukan urutan logis (Judul, *Lead*, Badan Berita, dan Penutup)

  Judul : 2-5 Kata yang disajikan secara ringkas serta mengasosiasikan dengan sesuatu yang memantik perhatian pembaca

  Lead : 2 hingga 3 kalimat yang mengintisarikan berita atau artikel, sehingga dengan membaca *lead*, pembaca akan tertarik untuk

melanjutkan pembacaan

Badan Berita : Sajian lengkap dari bahan yang akan ditulis

Ending/Penutup : Kalimat yang menyimpulkan isi dari berita. Biasa penutup pada berita memuat saran, solusi, maupun rekomendasi pada pembaca

Ilustrasi Penulisan Berita

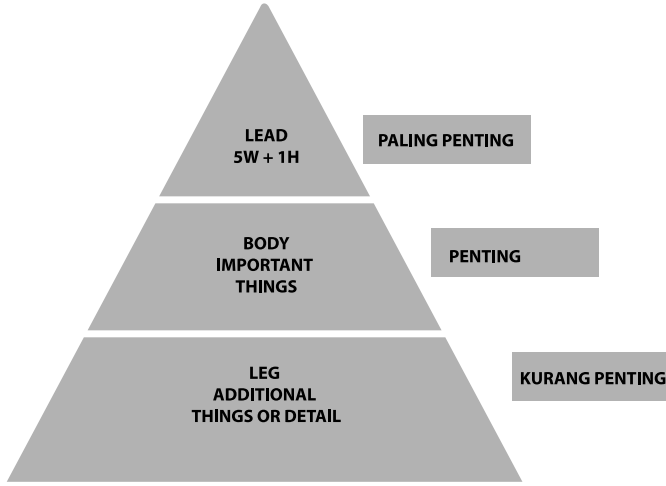

Penerapan prinsip 5W + 1 H

5W + 1 H	Rincian	Materi Tulisan
What	Apa tema yang ingin ditulis	Penjelasan tentang katregori isu atas peristiwa yang terjadi: KBB, Gender, Sosial, Budaya, Agama, Etnisitas
	Apa saja hal-hal yang ingin dituangkan dalam tulisan	
Who	Siapa yang menjadi tokoh utama ?	Penyebutan sumber dengan jelas baik, dari pelaku, pihak yang terlibat, masyarakat umum, stakeholders, korban, dsb.
	Siapa Narasumber pendukung untuk memperkaya cerita?	
When	Kapan kegiatan itu terjadi?	Keterangan mengenai waktu kejadian atau peritiwa terjadi secara detail, tahun, bulan dan tanggal.
	Mulai kapan kegiatan itu dilaksanakan?	

5W + 1 H	Rincian	Materi Tulisan
Where	Di mana lokasi kegiatan atau peristiwa terjadi?	Dalam menjelaskan lokasi peristiwa bisa ditambahkan keterangan tentang sejarah, budaya, maupun hal lain yang dianggap penting yang berkaitan dengan lokasi tersebut dan hubungannya dengan peristiwa yang terjadi
	Bagaimana gambaran lokasi kegiatan atau peristiwa terjadi	
Why	Mengapa peristiwa yang ingin diberitakan terjadi>	Penjelasan mengenai ini dapat dikupas dari berbagai sudut pandang
	Apa yang menjadi alasan dibalik peristiwa itu terjadi?	
How	Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi?	Penjelasan dari awal hingga akhir tentang proses terjadinya peristiwa.

2.2. OPINI

Opini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer, yang

merefleksikan pandangan penulis mengenai topik/subjek yang ditulis.

Jenis-jenis dari Artikel Opini antara lain, meliputi:

1. Editorial/Tajuk Rencana - Tulisan opini dari editor, editorial board, ataupun pandangan politik dari organisasi secara keseluruhan
2. Karikatur - Ilustrasi yang menampilkan gambar "kritik sosial" atas peristiwa yang terkini, dan seringkali mengungkapkan pandangan dari kartunis.
3. Kolom - Serangkaian artikel opini penulis yang dicetak secara teratur.
4. Surat kepada Editor - Surat-surat yang ditulis oleh pembaca yang mengungkapkan pendapat mereka baik yang mendukung atau menentang tajuk rencana.
5. Opini (Op-ed/komentar) - artikel opini yang dikirimkan ke surat kabar untuk diterbitkan. Kamus Merriam-Webster mendefinisikannya sebagai "esai di surat kabar atau majalah yang memberikan pendapat penulis dan ditulis oleh seseorang yang tidak dipekerjakan oleh surat kabar atau majalah tersebut.

1. Menulis Opini yang Baik

Memilih subjek/peristiwa yang ingin ditulis - Bagian ini merupakan bagian terpenting dalam penulisan opini, karena menyangkut topik/subjek apa yang ingin ditulis. Langkah ini mesti diawali dengan memahami topik apa yang relevan dengan isu terkait pandangan keagamaan yang inklusif, damai dan toleran.

Ada 4 hal mendasar dalam menentukan topik/subjek dalam penulisan opini:

- Klarifikasi - Penjelasan yang mendetail mengenai topik/subjek dalam isu keagamaan yang damai, toleran dan inklusif yang akan dibahas, agar dapat mudah dipahami dan dimengerti
- Kritik - memuat tentang pandangan kritis atas topik yang diangkat, semisal peraturan diskriminatif yang mengintimidasi minoritas agama/gender, tindakan sekelompok orang yang mendemoralisasi kelompok agama/kepercayaan tertentu, pemahaman tentang deteksi dini potensi radikalisme, dan sebagainya.
- Meyakinkan - mesti berisi narasi untuk meyakinkan dan mempengaruhi seseorang ke sudut pandang khusus penulis. Secara umum, sudut pandang yang dominan bertentangan dengan sudut pandang penulis, jadi penulis meski mengelaborasi pandangan untuk mencoba menjelaskan mengapa sudut pandang penulis lebih baik.
- Apresiasi - Penulis menjelaskan persetujuan pada seseorang/kelompok, sesuatu, atau ide. Penulis kemudian memaparkan mengapa setuju dengan orang atau tindakan tersebut, membela individu atau tindakan tersebut, dan bahkan mungkin mendukung individu atau tindakan tersebut.

Menyusun Argumen - Dibutuhkan argumentasi yang persuasif dan bisa menarik minat pembaca. Meskipun argumen atau sikap yang disampaikan relatif kontroversial atau melawan arus (anti mainstream), penulis dapat

melakukan klarifikasi dengan menjelaskan posisi *(standing point)* pada topik yang dibahas/ditulis.

Dalam penyusunan argumen ini, yang paling penting penulis juga mesti meletakkan judul yang menarik dan memantik pembaca untuk merenungi, bertanya, ataupun penasaran akan isi tulisan. Oleh karena itu, penulis mesti dapat menjelaskan posisi penulis dalam satu kalimat yang diletakkan pada bagian awal tulisan. Kalimat mengenai posisi penulis mesti disampaikan dengan kontroversial, hiperbolik, melawan arus, atau bahkan dengan nada candaan yang sarkastik. Contoh dari kalimat awal yang baik dapat dinarasikan, seperti berikut ini:

- "Perempuan harus melawan dominasi patriarki dalam membangun diskursus media…."
- "Sikap keagamaan yang toleran, damai, dan inklusif adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi…."
- "Kebijakan pemaksaan hijab di sekolah merupakan bentuk pelanggaran hak siswa untuk mengekspresikan…."
- "Hak kelompok aliran kepercayaan untuk menjalankan keyakinannya harus dilindungi negara"…..

Fakta-fakta - Tanpa fakta, argumen yang disampaikan tidak akan ada artinya. Argumen yang disampaikan dalam tulisan harus jelas dan mampu untuk menafsirkan fakta-fakta yang ada dengan cara yang logis dan membuat pembaca merenungi kembali konstruksi berpikir mereka yang selama ini dibentuk oleh pandangan-pandangan mainstream, yang seringkali dijejali oleh cara pikir yang eksklusif, intoleran, dan didasari atas kebencian terhadap, terutama kelompok-

kelompok minoritas agama dan gender.

Sampaikan Pandangan dari Sisi yang Lain - Elemen ini menjadi penting untuk menjelaskan kredibilitas penulis untuk mengelaborasi topik yang dibahas. Dengan mendedahkan, setidaknya satu pandangan yang berlawanan dari perspektif penulis, hal menunjukkan bahwa penulis mampu untuk bersikap objektif, adil, dan berimbang.

Menempatkan solusi yang realistis - Kredibilitas dan pengaruh penulis akan sangat bergantung pada solusi yang ditawarkan dalam artikel. Penulis tidak boleh hanya mengkritisi atau mengambil posisi berlawanan atas pandangan atau sikap yang salah. Namun, penting bagi penulis untuk menawarkan alternatif solusi yang lebih baik, agar argumentasi penulis dapat bersifat konstruktif dan berkontribusi pada promosi pandangan keagamaan yang toleran, damai, dan inklusif.

Gunakan pemilihan kata dan kalimat yang Efektif - artikel opini pada dasarnya ditulis dengan hanya 500 - 700 kata. Maka, untuk itu penulis mesti mampu untuk mengakomodir argumentasi dan pesan yang ingin disampaikan pada tulisan dengan narasi yang efektif dan meyakinkan pembaca.

2. Kerangka Penulisan Opini

Judul	: Judul Tulisan
Lead	: Berisi paragraf pembuka, dimana gagasan utama penulis dipaparkan
Tubuh *(Body)*	: Berisi paragraf-paragraf yang mendukung gagasan utama penulis

Ending/Solution	: Berisi alternatif solusi yang ditawarkan, dengan maksud untuk menguatkan kembali gagasan utama.

Berikut ini penjelasan lebih mendalam tentang kerangka tulisan dalam penulisan esai sebagaimana yang tersajikan dalam tabel di atas.

Judul *(head)* harus berisi judul yang menarik, artinya dalam waktu sekejap judul tersebut harus mampu menarik minat calon pembaca untuk membaca tulisan Anda. Ibaratkan dengan wajah, ketika pertama kali bertemu dengan orang, wajahnya yang akan pertama kita kenali (Suseno, 2006 : 44)

Lead menjadi pintu masuk bagi pembaca untuk melanjutkan membaca esai yang kita tulis, atau sebaliknya, tidak melanjutkan membaca esai yang kita tulis. Leher juga sudah menampilkan gagasan utama penulis. Dengan demikian leher memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu pertama, menyajikan gagasan utama penulis dan kedua, mengiklankan keseluruhan isi esai.

Tubuh *(Body)* berisi beberapa paragraf pendukung yang di dalamnya penulis memberikan penjelasan lebih rinci atas gagasan utama yang disajikan dalam *lead*. Penjelasan ini bisa disajikan dalam bentuk naratif, deskriptif, argumentatif dan eksploratif. Untuk memperkuat penjelasan dalam tubuh tulisan, penulis dapat mengutip fakta, data, pustaka atau pendapat ahli yang relevan.

Terakhir adalah **kaki *(ending/solution)*** yang berada di akhir esai yang fungsinya sebagai kesimpulan akhir tentang

apa yang disajikan dalam esai. Kesimpulan yang disajikan sebenarnya adalah menguatkan kembali gagasan utama yang disajikan di leher tulisan.

3. Penyuntingan

Tahapan akhir setelah draft artikel di finalisasi adalah melakukan penyuntingan atau editing. Tujuan dari proses penyuntingan dimaksudkan untuk meninjau kembali gagasan, substansi, dan materi dari tulisan, memperbaiki kemungkinan adanya kekeliruan baik dalam hal teknis seperti pemilihan kata, ejaan, dan tata bahasa atau struktur tulisan, maupun pada aspek substantif untuk menambahkan ataupun mengurangi gagasan-gagasan yang dirasa perlu ataupun tidak perlu, demi menghasilkan sebuah tulisan yang komprehensif, efektif, dan kompleks.

Oleh karena itu, pada proses penyuntingan dituntut kecermatan, kekritisan, dan keterbukaan penulis untuk menerima segala bentuk masukan atau rekomendasi yang penting, baik dari hasil review penulis sendiri ataupun review dari eksternal.

2.3. *Feature*

Feature merupakan artikel yang ditulis untuk menyajikan kedalaman cerita atas peristiwa aktual, cerita tentang seseorang atau permasalahan tertentu. Menurut Williamson (1975), secara karakteristik, *feature* merupakan suatu tulisan yang bersifat langsung, dapat mengabaikan 5W + 1 H, menyajikan kebenaran (faktual), bersifat imajinatif dan ketajaman untuk melihat suatu masalah yang dapat

menimbulkan perasaan emosional bagi pembaca seperti cemas, simpati, humor, maupun hal-hal yang menyedihkan atau menyenangkan. Artikel *feature* bisa ditulis oleh seorang ahli, jurnalis ataupun seseorang dengan konsen terhadap isu tertentu, yang mana konten teks ini memberikan informasi latar belakang tentang topik yang diceritakan serta pandangan atau pengalaman pribadi penulis.

Dalam penulisan *feature*, aspek penting yang patut diperhatikan sebelum melakukan penulisan adalah perihal pemilihan bahasa dan tata bahasa. Ada beberapa indikator dalam pemilihan bahasa dan tata bahasa untuk menghasilkan karya *feature* yang baik, meliputi:

1. Pilihan bahasa dapat berupa bahasa yang formal ataupun informal tergantung pada topik yang akan ditulis. Namun, yang penting diingat, penggunaan narasi/bahasa yang informal, sering digunakan sehari-hari dan menggunakan pendekatan orang pertama akan menciptakan corak tulisan yang bersifat personal pada karya tersebut.
2. Mengutamakan narasi cerita pada konteks waktu sekarang
3. Menggunakan variasi kalimat yang panjang dan pendek
4. Penggunaan kata-kata khusus (jargon) yang relevan akan menambah otentisitas informasi dan opini yang disajikan.
5. Menggunakan anekdot atau informasi latar belakang untuk mempertahankan minat pembaca.

6. Menyajikan fakta atau bukti memvalidasi sudut pandang penulis.
7. Pada artikel *feature* humor, penggunaan bahasa hiperbolis dan bersifat menggeneralisir digunakan untuk meningkatkan sisi humor.
8. Pertanyaan retoris dapat digunakan untuk melibatkan pembaca ke dalam cerita
9. Menggunakan kata-kata emosional untuk membangkitkan respons pribadi pembaca.
10. Penggunaan bahasa kiasan untuk membangkitkan dan melibatkan imajinasi pembaca ke dalam cerita (mis. Gambaran, perumpamaan, deskripsi).
11. Menggunakan kutipan langsung agar dapat mempersonalisasi topik.

Setelah mengetahui perihal pemilihan bahasa dan tata bahasa, agar pemahaman tentang penulisan *feature* semakin kompleks, modul ini menyajikan tentang Struktur dan Tata Penulisan *feature*. Struktur dan tata penulisan yang dimaksud merupakan pedoman bagi penulis dalam membangun kerangka *feature* dan pilihan narasi yang ditulis pada bagian-bagian paragraf *feature* untuk menghasilkan karya yang padu dan mampu menarik minat pembaca.

Pengantar	• Judul (*headline*): untuk mengidentifikasi fokus dari *feature*; penarik perhatian pembaca • Subjudul (*subheading*): untuk memberikan angle atau sudut pandang tertentu yang akan diangkat pada bagian yang ditulis • Baris pada permulaan karagan (By-line): untuk mengidentifikasi ahli atau jurnalis yang menulis *feature* • Menghubungkan pembaca dengan tulisan (*Hook*): Kalimat pertama yang menarik untuk 'mengaitkan' perhatian pembaca dan menetapkan sudut pandang melalui pernyataan langsung, penyertaan contoh atau pertanyaan hipotesis. • Paragraf Pengantar: Paragraf ini perluasan dari bagian "*Hook*," dan menetapkan corak dan fokus penulis untuk artikel tersebut.

Tubuh *(Body)*	• Paragraf 2: Poin utama di awal. Penjelasan tentang kontribusi orang/masalah yang diangkat terhadap kehidupan sosial secara umum. Bagian ini merupakan interpretasi peristiwa yang disusun menggunakan kata-kata penulis sendiri. • Paragraf 3 dan seterusnya: poin-poin utama lebih lanjut yang disertakan untuk menjelaskan peristiwa atau pencapaian menarik tentang orang/masalah untuk menginformasikan pembaca ataupun menyelidiki masalah lebih lanjut. Fakta, bukti, kutipan, pertanyaan yang menantang pembaca, dan pendapat disertakan dalam paragraf ini. • Foto, tabel, diagram, dan grafik juga penting disertakan dalam melengkapi teks artikel *feature* untuk menyajikan fakta atau bukti yang mendukung penjelasan dan interpretasi penulis tentang orang/isu/peristiwa • Juga dapat menyertakan potongan teks yang disorot untuk menekankan peristiwa atau kutipan tertentu

Kesimpulan	Paragraf penutup harus meninggalkan kesan yang mendalam dengan: • Mengingatkan pembaca tentang ide pokok artikel • Menyarankan tindakan yang tepat • Mendorong perubahan sikap atau pendapat

3. MANAJEMEN REDAKSI JURNALISME INKLUSIF

Setelah memahami tentang konsep dan teknik dalam implementasi Jurnalisme Inklusif, para peserta dari kalangan jurnalis, kelompok perempuan keagamaan, dan orang perorangan yang menaruh perhatian dan minat pada isu-isu terkait toleransi, perdamaian dan inklusif, mesti mengetahui bagaimana kerja dan operasional redaksi media. Produk karya jurnalistik yang telah dihasilkan tidak akan dapat diwadahi dan dimuat tanpa ada kebijakan redaksi media yang memiliki visi tentang jurnalisme inklusif. Internalisasi tentang jurnalisme inklusif pada redaksi media dapat dilakukan dengan memahami bagaimana alur produksi karya jurnalistik pada ruang redaksi dioperasionalisasikan.

Proses produksi berita di media online dalam teori yang dikemukakan oleh George Terry mengenai fungsi dari manajemen yaitu yang pertama *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), yang ketiga *actuating* (pelaksanaan), dan

yang terakhir controlling (pengawasan) (Terry, 1968)[18]

Perencanaan adalah proses berpikir intelektual yang digunakan untuk memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi di masa depan. Perencanaan memberikan gambaran yang jelas terhadap aktivitas organisasi, perilaku kerja manajer dan orang lain. Menurut Terry (2003), perencanaan adalah menentukan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya dan siapa yang melakukannya. Itu menjembatani jarak dari tempat kita berada ditempat yang ingin kita tuju.

Dalam tahap ini, dilakukan penyusunan atau penetapan visi, misi, nama media, motto, rubrikasi, segmentasi pasar *(positioning)* yang mencerminkan visi dan misi media tersebut (Romli, 2005: 19).[19]

Pengorganisasian. Menurut George R. Terry pengorganisasian adalah Pembentukan hubungan perilaku yang efektif diantara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efektif dan mendapatkan kepuasan pribadi dalam melakukan tugas-tugas yang dipilih dibawah kondisi lingkungan yang diberikan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. (Terry, 1968)

---

18 Fathya Kautsar FA., Analisis Manajemen Redaksi dan Kebijakan Redaksional Pemberitaan Bulu Tangkis di Media Dari: Studi Kasus di Media Online Detik.com, Kompas.com dan Indosport.com, Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, 2020.

19 Cendikia Dwi Fitria, Manajemen Redaksional TribunPekanbaru.com Dalam Menentukan Berita yang Layak, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Universitas Riau, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016.

Terdapat 2 jenis pendistribusian peran dalam ruang redaksi. pendistribusian yang pertama adalah membagi antara reporter sebagai pengumpul berita dan juga editor yang mengedit semuanya. Kedua adalah seseorang yang tidak terfokus pada satu spesialis saja, bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengedit berita, serta untuk menulis editorial dan tata letak halaman perencanaan, selain itu beberapa ruang redaksi konvergensi perlu menunjuk seseorang yang paham teknologi untuk bekerja sebagai penyangga antara teknologi baru dan jurnalis yang tidak terbiasa dengan teknologi. (degeler,2001 p.63-64)

Pelaksanaan. Pelaksanaan adalah ketika pemimpin redaksi mengarahkan staf redaksinya untuk memproduksi sebuah berita. Staf redaksi bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah ditentukan oleh media tersebut. Kegiatan yang dilakukan di tahap pelaksanaan adalah kegiatan memproduksi sebuah berita yang dimulai dari peliputan hingga berita siap diunggah ke dalam website

Dalam tahap ini semua bagian bekerja sesuai *planning* dan *organizing* yang telah disusun, termasuk rencana pemberitaan seperti rubrikasi, karakteristik berita layak muat, tema-tema yang diangkat, kriteria peristiwa dan narasumber, dan sebagainya. Tahap ini diawali dengan rapat redaksi (Romli, 2005: 19-20).

Pengawasan. Ciri-ciri pers berkualitas adalah yang dikelola dan dijalankan secara profesional, memenuhi segala standar etik dan syarat jurnalis yang bermutu. Pers yang berpihak pada public, non partisan. Pers yang bermutu tidak bersifat statis namun dinamis.

Apabila terdapat ketidaksempurnaan dari proses perencanaan dan pelaksanaan, maka proses pengawasan diperlukan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini dikarenakan jika proses perencanaan dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan, maka pengawasan dilakukan untuk mengatur kegiatan yang sudah direncanakan. Kesuksesan dan kegagalan dari perencanaan bergantung pada hasil dari proses pengawasan (Terry: 2003).

Dalam kerangka yang lebih luas, intervensi Jurnalisme Inklusif pada redaksi media berdasarkan panduan yang dikembangkan Swiss Agency for *Development* and Cooperation (SDC), sebagai dokumen panduan dalam mengasistensi media dalam peran mewujudkan masyarakat yang inklusif, adil, dan damai,[20] terdapat enam sektor media yang mesti di intervensi. Enam sektor yang dimaksud dapat menjadi titik masuk dalam mengidentifikasi serta menginjeksikan strategi intervensi dalam pengarusutamaan konsep jurnalisme inklusif.

Sektor Media	**Intervensi**
Jurnalis *(individual journalist)*	• Pelatihan tentang etika dan kemampuan teknis jurnalisme • Pelatihan pada isu-isu tematik

20 Anonymous, The role of Media in Creating Inclusive, Just and Peaceful Societies: Guideline for SDC Media Assitance, Swiss Agency for *Development* and Cooperation SDC, 2020.

Sektor Media	Intervensi
Media *outlet*s	• Pelatihan tentang perbedaan tipe media: broadcaster layanan masyarakat, radio komunitas, TV swasta ataupun koran harian • Peningkatan kapasitas dalam manajemen, pemeliharaan teknis, peningkatan pendapatan, dll.
Institusi media	• Dukungan pada pendidikan jurnalisme • Dukungan terhadap regulasi media dan aktor regulasi mandiri
Faktor ekonomi dan teknologi	• Pelatihan perencanaan dan manajemen bisnis media • Meningkatkan faktor ekonomi secara keseluruhan untuk sektor media • Pelatihan tentang teknologi baru dan peluang yang relevan
Lingkungan politik dan hukum, dan keamanan	• Mendukung kemauan politik untuk lingkungan media yang mendukung implementasi jurnalisme inklusif • Mendukung reformasi hukum • Pelatihan tentang keselamatan dan keamanan jurnalis dan *outlet* media
Kepercayaan dan nilai-nilai budaya masyarakat	• Mendukung visi masyarakat tentang media sebagai pilar demokrasi ke-empat • Pelatihan program literasi media dan informasi di sekolah dan untuk orang dewasa

BAGIAN IV

PEMAKNAAN KERANGKA PEMBELAJARAN

A. LATIHAN BERBASIS MASALAH *(PROBLEM BASED LEARNING)*

Latihan berbasis masalah merupakan metode belajar yang menggunakan masalah yang kompleks dan nyata untuk memicu pembelajaran. Latihan berbasis masalah atau yang lebih dikenal dengan Metode "Problem Based Learning", digunakan untuk mendorong keterampilan peserta pelatihan dalam mengaplikasikan materi yang telah diberikan pada bagian sebelumnya.

Latihan berbasis masalah bertujuan untuk melatih peserta sebagai berikut:

1. Mengembangkan keterampilan mengumpulkan fakta atau berbagai informasi terkait konsep atau teori yang melatarbelakangi terjadinya masalah;

2. Mengembangkan keterampilan dalam mengkritik, menganalisis dan menemukan langkah solutif atas masalah;

3. Mengembangkan keterampilan komunikasi di dalam kelompok, sehingga penyelesaian masalah dilakukan bersama-sama tidak individual;

Masalah dalam latihan berbasis masalah disebut sebagai "pemicu". Pemicu dalam modul ini merupakan contoh-contoh dari produk karya jurnalistik, yakni berita, opini dan *feature* yang pernah dimuat dan ditampilkan di media. Selain, daripada itu, fokus modul ini juga tidak hanya menyorot pada hal-hal teknis dalam membangun kerangka penulisan, namun juga menyediakan analisis dan pemahaman bagi peserta dalam membangun perencanaan peliputan dan "dapur redaksi" yang berorientasi pada jurnalisme inklusif.

Proses pembelajaran latihan berbasis masalah dilaksanakan mengikuti alur dan struktur yang ditetapkan. Pada sesi pemahaman tentang jurnalisme inklusif, metode pembelajaran yang ditetapkan adalah curah pendapat, sementara pada sesi analisis atas karya jurnalistik, metode yang digunakan adalah diskusi kolaboratif. Setelah mengamati, mengidentifikasi dan mengelaborasi beberapa contoh produk karya jurnalistik dan rencana peliputan Jurnalisme Inklusif, peserta diminta untuk menjawab lembar diskusi yang telah disediakan.

Keberhasilan latihan berbasis masalah terletak pada peran fasilitator yang menantang pemicu sebagai bahan aktualisasi pembelajaran. Kualitas dan atribut dari fasilitator memberikan dampak yang signifikan bagi proses jalannya kegiatan latihan berbasis masalah. Setidaknya fasilitator berperan sebagai berikut:

1. Fasilitator sebagai activator, mampu menciptakan suasana peserta sebagai pusat dari pelatihan;

2. Fasilitator sebagai model, mampu mendorong diskusi reflektif dan berpikir kritis;

3. Fasilitator sebagai challenger, mampu menantang peserta dalam mengelaborasi masalah;

4. Fasilitator sebagai diagnostician, mampu mengidentifikasi kemampuan proses belajar peserta;

5. Fasilitator sebagai monitor dan evaluator, mampu menahan diri untuk tidak mengambil peran sebagai narasumber dan tetap mendorong peserta untuk mengelaborasi strategi penyelesaian masalah.

Agar fasilitator dapat berperan secara maksimal, di dalam modul ini disediakan pula kisi-kisi untuk membantu fasilitator mengembangkan suasana diskusi di dalam kelompok. Kisi-kisi tersebut sifatnya optional, digunakan hanya jika peserta di dalam kelompok diskusi kurang berjalan maksimal.

1. LATIHAN BERBASIS MASALAH PADA JURNALISME INKLUSIF

METODE: CURAH PENDAPAT

KISI-KISI PERTANYAAN TENTANG JURNALISME INKLUSIF

Metode dalam menginternalisasikan pemahaman tentang jurnalisme inklusif dioperasionalisasikan melalui curah pendapat. Kisi-kisi pertanyaan pada sesi ini ditetapkan,

untuk memastikan alur, pemahaman dan langkah dalam curah pendapat mengenai penerapan jurnalisme dapat berjalan efektif, tidak hanya pada level jurnalis selaku individu, begitupun dengan membangun kultur yang terbuka pada ruang media dengan menetapkan jurnalisme inklusif sebagai intersectional issue dalam kerja-kerja media. Sebagai keluaran pada sesi ini, diharapkan akan menghasilkan matriks dan tabel temuan tentang kondisi, situasi, hambatan, rencana kerja dan proses evaluasi dalam implementasi jurnalisme inklusif pada redaksi media dan jurnalis.

Pertanyaan	Jawaban
Jelaskan dasar dari komunikasi inklusif yang menjadi landasan dari Jurnalisme Inklusif	
Bagaimana pemahaman anda tentang praktik jurnalisme secara umum saat ini?	
Apa anda mengetahui konsep jurnalisme inklusif? Jelaskan	
Hambatan potensial dan faktual seperti apa yang dihadapi dalam penerapan jurnalisme inklusif?	

Pertanyaan	Jawaban
Seperti apa redaksi media memandang isu-isu keagamaan yang inklusif, damai, dan toleran?	
Mengapa coverage media terkait isu tersebut belum efektif menjadi ruang representasi bagi kelompok minoritas dan rentan?	
Bagaimana anda sebagai jurnalis memandang 4 prinsip dari Jurnalisme Inklusif (keberagaman, inklusi, keadilan, rasa kepemilikan)?	
Apakah anda pernah meliput tentang isu yang dimaksud? Seberapa sering frekuensinya?	
Jelaskan komitmen anda sebagai jurnalis dan redaksi media dalam mengimplementasikan 6 karakteristik jurnalisme inklusif?	

Pertanyaan	Jawaban
Formulasi seperti apa yang akan dikembangkan redaksi media dalam membangun rencana kerja dalam mengimplementasikan jurnalisme inklusif?	
Lainnya	

2. LATIHAN BERBASIS MASALAH PADA PRODUK KARYA JURNALISME INKLUSIF

METODE: DISKUSI KOLABORATIF

2.1. BERITA

Larangan Non-Muslim Dicabut, Slamet Pilih Tinggalkan Dusun

wis | CNN Indonesia
Kamis, 04 Apr 2019 10:47 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Aturan diskriminatif di Pedukuhan Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta, soal larangan bermukim bagi warga non-muslim telah dicabut. Namun Slamet

Jumiarto yang sempat jadi korban aturan diskriminatif itu, sudah tak berniat lagi untuk tinggal di sana. Slamet dan keluarganya memutuskan tetap pergi meski aturan itu telah dicabut. Hanya saja, dia berharap kasus yang dialaminya tidak terulang kepada orang lain. Slamet ingin kasus itu menjadi pelajaran.

"Ketua dusun melarang saya, RT-nya juga, RT 08 melarang saya dan keluarga dan keluarga saya tinggal di sini karena saya seorang non muslim atau seorang Katolik," kata Slamet saat diwawancara CNN Indonesia TV.

Kasus Slamet ini diketahui secara luas setelah video berisi pengakuannya viral di media sosial. Dalam video itu, Slamet yang berprofesi sebagai pelukis mengatakan dirinya mendapat rumah kontrakan baru di Pedukuhan Karet. Dia memilih kontrakan baru di sana karena lebih murah dan ruangannya lebih luas. Namun ketika melapor kepada kepala dukuh, dia justru dilarang tinggal di kontrakan barunya karena dirinya non muslim.

Slamet kemudian mencoba berbicara dengan Ketua RT 8 tetapi larangan serupa juga dia dapatkan. Penolakan itu diketahui berdasarkan aturan kampung tersebut yang dibuat pada 2015 dan ditandatangani pejabat dusun. Aturan janggal tersebut menetapkan dua syarat yakni syarat nonmateri dan syarat materi bagi warga pendatang yang ingin tinggal di sana.

Syarat nonmateri terdiri dari empat aturan. Pertama, pendatang baru harus Islam. Islam yang dimaksud

adalah sama dengan yang dianut oleh penduduk Pedukuhan Karet yang sudah ada.Kedua, tidak mengurangi rasa hormat, penduduk Pedukuhan Karet keberatan untuk menerima pendatang baru yang menganut aliran kepercayaan atau agama non-Islam seperti yang dimaksud ayat 1. Ketiga, bersedia mengikuti ketentuan adat dan budaya lingkungan seperti yang sudah tertata seperti: Peringatan keagamaan, gotong royong, keamanan lingkungan, kebersihan lingkungan dan lain-lain.

Terakhir, bagi yang pendatang baru baik yang menetap atau kontrak/ indekos wajib menunjukkan identitas kependudukan asli dan menyerahkan fotokopiannya. Aturan inilah yang membuat Slamet beserta anak dan istrinya sempat ditolak oleh Kepala Dusun dan Ketua RT.

Slamet sebenarnya sudah mencoba sejumlah upaya agar bisa tetap tinggal di kontrakan barunya. Dia bahkan sempat melaporkan kasus yang dialaminya kepada Sekretaris Sultan Hamengku Buwono X.

Dari laporan itu digelar lah musyawarah dengan melibatkan pihak terkait, tapi hasilnya tetap ditolak. Upaya mediasi juga ditempuh. Namun gagal menghasilkan jalan keluar bagi Slamet. Kini, setelah kasus Slamet menjadi viral, pihak Pedukuhan memutuskan mencabut aturan tersebut.

“Peraturan ini dibuat tahun 2015 lalu, sampai sekarang aturan itu masih diberlakukan. Karena ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya mendiskreditkan warga yang nonmuslim, kami sepakat kami cabut,” kata Kepala Dusun Iswanto.

Iswanto mengatakan alasan lain pencabutan aturan tersebut karena dinilai melanggar Undang Undang Dasar 1945. Meski sudah dicabut, Slamet dan keluarganya tak lagi mau tinggal di Pedukuhan Karet. (wis/gil)

KISI-KISI PERTANYAAN TENTANG ANALISIS BERITA

1. Mengapa genre teks berita penting? Gunakan contoh untuk mendukung argumen Anda
2. Siapa saja sumber informasi sampel berita di atas?
3. Bagaimana struktur teks berita berkontribusi pada penciptaan maknanya? Dokumen.
4. Apa penyebab ketegangan agama yang tercantum dalam contoh Anda?
5. Bagaimana hakikat konflik agama menurut berita tersebut?
6. Bagaimana penulis membingkai konflik agama dalam berita di atas?
7. Bagaimana proses identifikasi kelompok agama?

Sabtu 15 Juli 2023, 05:00 WIB

Kaum Muda, Toleransi, dan Pancasila

Halili Hasan
Akademisi Politik di Fishipol UNY,
Direktur Eksekutif SETARA Institute

DAYA lenting Pancasila, sebagai dasar negara dan landasan filosofis pokok (philosofische grondslag) bagi Indonesia tak terbantahkan. Pancasila telah dipilih sebagai ideologi terbaik yang dirumuskan secara seksama, dan diwariskan oleh para pendiri bangsa kepada kita semua.

Secara yuridis, rumusan tersebut tertuang dalam konstitusi negara, terutama pada alinea terakhir Pembukaan UUD 1945, yang hingga kini tak tergoyahkan. Sementara itu, perjalanan sejarah bangsa menunjukkan bahwa Pancasila terbukti tangguh sebagai dasar negara yang tidak tergantikan dalam berbagai gejolak politik apa pun.

Namun demikian, beberapa tantangan besar menghadang di depan mata. Salah satu di antaranya mengenai daya juang generasi kini untuk membumikan Pancasila. Bung Karno pernah mengingatkan, "Pancasila harus menjadi realiteit!" Menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam

realitas tentu membutuhkan perjuangan yang simultan juga spartan.

Pada saat yang sama, terjadi fenomena penurunan dukungan publik terhadap Pancasila. Survei LSI pada 2018 menjelaskan penurunan drastis dukungan publik terhadap Pancasila, yaitu di angka 75,3 %. Padahal, dalam survei tahun 2005 dukungan kepada Pancasila mencapai 85,2%. Artinya, dukungan terhadap Pancasila mengalami penurunan sekitar 10% selama 13 tahun terakhir. Jika tren tersebut berlanjut, ke depan tantangan kebangsaan kita akan semakin berat.

Potret toleransi kaum muda

Selain itu, agenda pemajuan toleransi dalam tata kebinekaan Indonesia juga menjadi pekerjaan rumah bersama. Terlebih lagi, di kalangan generasi muda yang merupakan cadangan utama bangunan masa depan Indonesia. Dalam konteks itu penting untuk menelisik dan mengulik potret toleransi di kalangan pemuda. Beberapa waktu lalu SETARA Institute menyelenggarakan survei dalam kerangka kerja konsorsium Inklusi yang terdiri atas INFID, Maarif Institute, Yayasan Inklusif, Media Link, Fatayat NU, dan Unika Soegijopranata. Survei dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan baru mengenai status toleransi dan juga respons atas dinamika intoleransi yang mengemuka dalam beberapa dekade terakhir.

Dalam berbagai isu kunci toleransi, survei ini mengungkap kecenderungan yang positif. Tingginya penerimaan perbedaan keyakinan (99,3%), penerimaan perbedaan ras dan etnik (99,6%), empati terhadap kelompok yang berbeda agama/keyakinan (98,5), dukungan pada kesetaraan gender (93,8%) dalam kepemimpinan OSIS ialah tren yang sangat positif di kalangan pelajar. Dengan kata lain, ekspresi intoleransi di sejumlah sekolah sesungguhnya tidak memperoleh dukungan signifikan dari para siswa di area penelitian ini. Namun demikian, jika diuji dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih ideologis, apalagi yang berdimensi politik, kecenderungan toleransi semakin menurun. Misalnya, soal apakah kaum muda berbasis sekolah itu akan menahan diri untuk melakukan kekerasan dalam merespons penghinaan terhadap agama yang dianut, 20,2% responden menyatakan tidak bisa menahan diri. Sekalipun angka yang bisa menahan diri masih cukup besar di 79,8%.

……

……

……

……

……

……

KISI-KISI PERTANYAAN TENTANG ANALISIS OPINI

1. Mengapa genre teks opini penting? Gunakan contoh untuk mendukung argumen Anda
2. Apa argumentasi utama dalam artikel tersebut, dan bagaimana dikembangkan?
3. Berapa banyak sumber informasi yang dikutip pada artikel opini di atas?
4. Bagaimana bentuk struktur artikel yang disusun? dan mengapa disusun seperti itu?
5. Apakah penulis menjaga sikap objektivitas jurnalistik, dan bagaimana ia melakukannya?
6. Bagaimana struktur teks opini berkontribusi pada penciptaan maknanya? Dokumen.
7. Bagaimana isu toleransi digambarkan dalam artikel tersebut?

2.3. *FEATURE*

'Saya Yahudi, tapi di KTP Islam',

penganut agama minoritas ingin diakui secara 'legal' demi mengakhiri 'diskriminasi'

Sejumlah penganut agama minoritas di Indonesia berharap pemerintah Indonesia mengakui keberadaan mereka, sehingga bisa mengisi kolom agama di

kartu identitas kependudukan (KTP) sesuai dengan keyakinannya. Alasannya, tanpa pengakuan dari negara, mereka mengaku mengalami diskriminasi di ruang publik dan tidak bisa leluasa menunjukkan identitas diri.

Dihadapkan kenyataan seperti itulah, sebagian mereka lalu mengaku memilih mengisi kolom agama di KTPnya dengan salah-satu agama yang sudah diakui negara, demi 'keamanan' dan 'tidak didiskriminasi'. Dikatakan, mereka memilih melakukan hal itu dengan sadar, walaupun disebutnya 'membohongi diri'.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengatakan penganut agama minoritas yang belum diakui secara resmi oleh negara "bisa mengisi kolom penghayat kepercayaan selama mereka mau dikategorikan sebagai Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Sebagian pegiat keberagaman menyarankan salah-satu opsi penyelesaiannya, yaitu kolom agama "dihilangkan" dari KTP, walaupun hal itu juga tidak mudah, karena dikhawatirkan muncul stigma dianggap "tidak beragama". Itulah sebabnya, sebagian pegiat keberagaman meminta agar negara mengakui dan melindungi hak sipil sebagai warga negara seiring dengan berlakunya UU KUHP yang baru. Dengan demikian penganut agama minoritas di Indonesia bisa mencantumkan agamanya di kartu identitas tanpa ada ketakutan atau didiskriminasi.

'Penganut agama minoritas tidak dapat layanan agama'

Di Indonesia, selain terdapat enam agama resmi yang diakui negara, ada agama-agama minoritas yang disebut dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, sebagai "non-recognize religion" namun dihormati keberadaannya seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoisme, Baha'i, dan Sikh.

Pengkategorian yang berbeda itu, kata Halili Hasan, menjadi problematik sebab pada akhirnya penganut agama minoritas tersebut "tidak mendapat pelayanan agama". Dan, menurut pimpinan LSM Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk), Thowik, di masa Orde Baru, negara "memutuskan" memasukkan mereka ke salah satu agama mayoritas di kolom agama Kartu Identitas Penduduk (KTP).

"Jadi negara yang memutuskan, bukan mereka. Kalau mereka sih maunya ya status agama di KTP sesuai dengan agama yang dianut," ujar Thowik kepada BBC News Indonesia, Selasa (04/07).

Sejumlah penganut agama minoritas, seperti Yahudi dan Sikh, ingin perlakuan itu diakhiri karena hanya melahirkan diskriminasi dan ketakutan. Seperti yang dialami Ezra Abraham, penganut Yahudi di Cirebon, Jawa Barat. Dia bercerita di kolom agama KTPnya, dia memilih mencantumkan agama Islam dan hal itu disebutnya "seperti membohongi diri sendiri". Tapi ia tak punya pilihan lain demi alasan "keamanan dan bisa mendapatkan

layanan umum". "Karena agama di KTP adalah Islam, mau tidak mau saya harus ikut acara-acara muslim. Jadi kadang ngebunglon, rasanya membohongi diri sendiri," imbuhnya kepada BBC News Indonesia.

Ezra sebetulnya lahir dari keluarga muslim. Tapi pada 2011, dia memutuskan memeluk Yudaisme yang juga dianut oleh nenek dari garis keturunan ayahnya. Kala sedang mengurus kartu identitas kependudukan pada 2016, Ezra pernah berencana untuk mengosongkan kolom agama. Hanya saja niat itu kandas setelah mendapat saran dari teman-temannya. Ketika itu, katanya, warga negara yang mengosongkan kolom agama dicap sebagai penganut ateisme dan malah mengalami tindakan diskriminasi semisal tidak mendapatkan layanan publik.

"Saya Yahudi, di KTP Islam. Untuk menghindari diskriminasi yang tidak perlu itu disarankan jangan," ucapnya. "Saya khawatir keluarga di rumah bisa kena persekusi, apalagi Yahudi kurang bisa diterima di Indonesia. "Tahun 2009 atau 2010 sinagoge Yahudi di Surabaya ditutup oleh kelompok intoleran. Persekusi semacam itu bisa saja terjadi lagi, kalau ada kejadian buruk di Timur Tengah pasti ribut di sini," tutur Ezra.

Ia menyadari untuk bisa mencantumkan agama yang dianutnya sesuai dengan di KTP tidaklah mudah. Itulah kenapa dia menilai, pencantuman agama Islam di kartu identitas kependudukannya "sebatas formalitas untuk keperluan administrasi". "Saya sudah bisa memisahkan

apa yang saya percaya dengan apa yang ada di kartu identitas. Jadi biasa saja, meskipun kalau keinginan [untuk mencantumkan agama Yahudi di KTP] tetap ada." Di Indonesia, menurut beberapa laporan, setidaknya ada 500 orang pemeluk Yudaisme. Beberapa orang Yahudi ada yang mengisi kolom agama di KTP dengan Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lainnya dilaporkan menyebut sebagai Kristen.

Pengikut Sikh: 'Kami masih harus di bawah naungan sebuah entitas tertentu'

Penganut Sikh di Jakarta, Harkirtan Kaur, mencantumkan agama Hindu di kolom agama KTPnya seperti sebagian besar komunitasnya. Dari cerita orangtuanya, pemeluk Sikh memilih Hindu di kartu identitas kependudukan, karena faktor kultural yang sama-sama berasal dari India. "Karena dulu orang-orang India yang ke Indonesia sebagian besar beragama Hindu. Setelah itu agama dari India yakni Hindu yang diakui negara. Karena dari asal yang sama, akhirnya membuat pendahulu-pendahulu Sikh mencantumkan agama Hindu," jelas Harkirtan kepada BBC News Indonesia.

Namun demikian, kata Harkirtan, ada pergulatan batin lantaran mencantumkan sesuatu yang bukan identitas dirinya. "Tentunya identitas atau jati diri kita tidak bisa diwujudkan dengan baik. Kami masih harus di bawah naungan sebuah entitas tertentu, di mana entitas itu bukan kami. Sikh bukan bagian dari Hindu," tegasnya.

Lebih dari itu pemahaman orang-orang kerap keliru terhadap pengikut Sikh karena tidak memahami ajaran agama tersebut beserta atribut yang biasa dikenakan. Suatu kali pernah terjadi tindakan diskriminasi. Dua orang kakak beradik penganut Sikh sempat dilarang menaiki transportasi MRT hanya karena memakai kirpan atau sejenis pisau kecil yang merupakan lambang komitmen Sikh yang sudah menjalani ritus inisiasi atau baptisan. Ketidaktahuan petugas MRT itu, sambungnya, menganggap kirpan adalah senjata tajam. "Petugas itu kekeuh menyuruh mereka melepas atribut tersebut."

Persoalan lain, bagi orang Sikh, ada larangan memotong rambut. Tapi karena ada kekhawatiran diejek maka banyak pria dan perempuan Sikh yang memangkas rambut mereka. Sebab kalau mempertahankan pantangan itu, bakal dirundung oleh teman-teman di lingkungan sekitar.

"Misalnya yang pakai turban kadang diledekin di sekolah."

Itu mengapa, Harkirtan Kaur ingin suatu saat bisa mencantumkan agama Sikh di KTPnya. Setidaknya dengan begitu pengetahuan orang-orang terhadap orang Sikh tidak keliru dan tak lagi berlaku diskriminasi. Untuk diketahui pengikut Sikh di Indonesia disebutkan berkisar 15.000 orang.

LSM Setara: Ada harapan mengakui agama minoritas

Direktur Eksekutif LSM Setara Institute, Halili Hasan, menjelaskan pencantuman kolom agama di kartu identitas kependudukan dimulai pada masa Orde Baru

sebagai mekanisme tertentu untuk bisa mengidentifikasi warganya. Kendati sesungguhnya, menurut Halili, kolom agama di KTP tidak punya fungsi apapun.

"Kalau tidak ada kolom agama justru lebih clear. Orang diidentifikasi bukan sebagai pemeluk agama tertentu, tapi sebagai warga negara yang wajib dijamin hak-haknya," ucap Halili Hasan kepada BBC News Indonesia.

Tapi ketika ada pencantuman kolom atas dasar agama, tindakan diskriminasi mulai terjadi. Kelompok agama mayoritas, sambungnya, akhirnya memberlakukan larangan bagi penganutnya dan pengikut agama lain. Semisal melarang perkawinan beda agama.

"Harusnya soal perkawinan, tidak apa-apa beda agama. Negara tidak bisa mengintervensi itu."

Padahal kalau merujuk pada pasal 29 ayat UUD 1945, negara semestinya mengakui agama dan kepercayaan yang dianut warga negara. "Karena tertulis di ayat itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya."

Hanya saja, keberadaan UU nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, disebutnya justru membatasi kebebasan beragama ketika istilah blasphemy atau penghinaan tercantum di beleid itu. Pasalnya di UU tersebut hanya ada enam agama yang diakui secara resmi: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan KongHu Cu. Agama atau kepercayaan di luar dari itu,

berpotensi dituduh sebagai penghinaan jika ajarannya tidak sesuai dengan ajaran agama mayoritas. Akan tetapi, menurut Halili, harapan atas pengakuan negara terhadap agama-agama minoritas terbuka begitu Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) berlaku pada 2026.

"UU KUHP yang baru menghapus ketentuan lain yang diatur di KUHP lama, termasuk soal penodaan agama. Sehingga UU PNPS mestinya tidak berlaku lagi dan seharusnya tidak ada kendala bagi negara untuk memberikan perlindungan pada kelompok ini." "Jadi secara langsung mengacu pada pasal 29 UUD 1945. Tidak ada lagi agama resmi dan tidak resmi." "Tinggal bagaimana negara membuat aturan turunan, di bawah UUD, dengan mengacu pasal 29 ayat 2." Bagi Halili itu adalah satu-satunya jalan. Sebab pilihan mengosongkan kolom agama hanya akan "memicu stigma baru sebagai penganut ateisme".

Apa tanggapan pemerintah?

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengatakan berdasarkan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) 1 dan 5 diatur bahwa keterangan tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Dengan demikian 'Penghayat Kepercayaan' tidak dicantumkan dalam kolom agama di KK dan KTP. Namun

tetap dilayani dan dicatat dalam basis data kependudukan. Tetapi merujuk pada gugatan uji materi terhadap pasal 61 dan pasal 64 UU Adminduk ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengosongan kolom agama, dianggap menyebabkan diskriminasi, sambung Teguh. "Dengan putusan MK itu, MK mengabulkan gugatan uji materi penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui oleh pemerintah." "Status penganut kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom KK dan KTP elektronik sebagai 'penghayat kepercayaan' tanpa merinci kepercayaan yang dianut."

Khusus bagi agama seperti Sikh atau Yahudi, kata Teguh, bisa dicatat sebagai penghayat kepercayaan sepanjang mereka mau agamanya dikategorikan sebagai penghayat dan terdaftar di Kemendikbud.

Berdasar data Kemendikbud pada 2017, terdapat 187 kelompok penghayat kepercayaan yang tersebar di 13 provinsi di Indonesia. Rinciannya, Sumatera Utara 12 kelompok, Riau 1 kelompok, Lampung 5 kelompok, dan Banten 1 kelompok. Ada pula di DKI Jakarta 14 kelompok, Jawa Barat 7 kelompok, Jawa Tengah 53 kelompok, kemudian di Jogjakarta 25 kelompok. Lalu di Jawa Timur 50 kelompok, Bali 8 kelompok, Nusa Tenggara Barat 2 kelompok, Nusa Tenggara Timur 5 kelompok, dan Sulawesi Utara 4 kelompok.

KISI-KISI PERTANYAAN TENTANG ANALISIS *FEATURE*

1. Mengapa genre teks *feature* di atas penting? Gunakan contoh untuk mendukung argumen Anda
2. Siapa saja sumber informasi dalam sampel terpilih?
3. Bagaimana struktur teks *feature* berkontribusi pada penciptaan maknanya? Dokumen.
4. Apa penyebab ketegangan agama yang tercantum dalam contoh Anda?
5. Bagaimana penulis membingkai konflik agama?

BAGIAN V

PRAKTIK PELATIHAN

A. LOKAKARYA PELATIHAN

Lokakarya pelatihan atau workshop pelatihan jurnalisme inklusif merupakan kegiatan melatih sekelompok orang yang telah diseleksi dan ditetapkan agar dapat memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang implementasi jurnalisme inklusif.

Bagi jurnalis atau wartawan selaku peserta, lokakarya pelatihan merupakan tahapan kegiatan implementasi dari pengetahuan yang telah diterima. Terkhusus pada jurnalis, kompetensi dasar tentang penulisan produk karya jurnalistik tentu bukan menjadi fokus utama, dengan kemampuan dan lingkup kerja yang memang sudah bergulat dengan pemberitaan, penulisan laporan, *feature*, berita investigasi, laporan mendalam, dan sebagainya. Melalui kegiatan lokakarya pelatihan, jurnalis ditekankan pada konsep-konsep penting mengenai implementasi jurnalisme inklusif dalam aktivitas kerja jurnalis, membangun kesadaran akan peliputan isu atau peristiwa yang berhubungan dengan Pandangan Keagamaan yang Inklusif, Damai, dan Toleran, serta yang paling utama bagaimana membangun kultur jurnalisme inklusif pada ruang redaksi

media, baik dalam tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan (peliputan), dan pengawasan.

Sementara itu, peserta dari kelompok perempuan keagamaan dan individu yang menaruh perhatian pada isu-isu inklusivitas, toleransi, dan keberagaman, selain daripada menginternalisasikan pemahaman tentang konsepsi jurnalisme inklusif, kompetensi dasar tentang teknik penulisan produk karya jurnalistik, berupa penulisan berita, opini, ataupun *feature* penting untuk dipahami terlebih dahulu. Dengan mengetahui dasar-dasar dalam penulisan karya jurnalistik, diharapkan dua kelompok peserta tersebut, mampu untuk mengaktualisasikan pemahaman tersebut dalam berbagai ragam karya yang akan mengisi ruang-ruang media, di tengah terbatasnya teks dan narasi tentang isu-isu inklusivitas, toleransi dan keberagaman.

B. MEKANISME PENYELENGGARAAN LOKAKARYA PELATIHAN

1. PESERTA LOKAKARYA PELATIHAN

Jumlah peserta pada satu kali penyelenggaraan lokakarya pelatihan secara ideal berjumlah sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 30 orang dengan komposisi gender berimbang. Masing-masing peserta yang telah memperoleh pemahaman tentang dasar-dasar dan teknik penulisan jurnalisme inklusif, akan mengikuti praktik penulisan dan penyusunan rencana tindak lanjut strategi implementasi jurnalisme inklusif.

2. STRUKTUR PROGRAM

Kegiatan "reflection (praktik pembelajaran)" merupakan kegiatan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam satu proses berkesinambungan. Melalui praktik pembelajaran, jurnalisme inklusif diuraikan ke dalam satu proses yang berkesinambungan dan diupayakan mencapai tujuan di dalam standar kompetensi. Berikut gambaran struktur program kegiatan lokakarya pelatihan:

Tahapan	Materi	Metodologi
Praktik Pembelajaran	Penerapan Inklusif Jurnalisme	Materi
		Review Materi
		Problem Based Learning pada 6 Materi
		Praktik Penulisan
Perencanaan Tindak Lanjut	Internalisasi Jurnalisme Inklusif pada Redaksi Media	Identifikasi, Penyusunan Rencana tindak lanjut, strategi, dan intervensi program

C. PEMBELAJARAN BERBASIS PRAKTIK *(PRACTICE BASED LEARNING)*

1. PENULISAN BERITA

Judul

Lead:

_____
_____
_____
_____
_____

Badan Berita;

_____
_____
_____
_____
_____

Ending/Penutup:

_____
_____
_____
_____
_____

2. PENULISAN OPINI

Judul

Lead:

_____
_____
_____
_____
_____

Badan Berita;

_____
_____
_____
_____
_____

Ending/Penutup:

_____
_____
_____
_____
_____

3. PENULISAN *FEATURE*

Pengantar	Judul (*headline*) Subjudul (*subheading*) Baris pada permulaan karagan (By-line): …… …… …… Menghubungkan pembaca dengan tulisan (*Hook*): …… …… …… Paragraf Pengantar: …… …… ……
Tubuh *(Body)*	Paragraf 2: …… …… …… …… Paragraf 3 dan seterusnya: …… …… …… ……

Kesimpulan	…… …… …… …… ……

4. INTERNALISASI JURNALISME INKLUSIF PADA MANAJEMEN REDAKSI

Tahapan	**Strategi**
Perencanaan	11. 2. 3. 4. *dst..*
Pengorganisasian	1. 2. 3. 4. *dst..*
Pelaksanaan (Peliputan)	1. 2. 3. 4. *dst..*

Pengawasan	1. 2. 3. 4. *dst*..

5. ANALISIS STRATEGI INTERVENSI MEDIA DALAM PENERAPAN JURNALISME INKLUSIF

Sektor Media	**Intervensi**
Jurnalis (individual journalist)	-
Media *outlet*s	-
Institusi media	-
Faktor ekonomi dan teknologi	-
Lingkungan politik dan hukum, dan keamanan	-
Kepercayaan dan nilai-nilai budaya masyarakat	-

.

REFERENSI

"Rising Tide of Restrictions on Religion," September 2012, Pew Research Center.

Ammu Joseph et. al., Indikator Sensitif Gender untuk Media: Kerangka Indikator Mengukur Sensitivitas Gender pada Organisasi dan Konten Media, terj, Bonardo M. Wahono, Jakarta: AJI Indonesia, 2015.

Anita Ramsak, Guidelines for Gender Sensitive Reporting, Institut Zavajnu Politiku with support from Ministry of Foreign Affairs Republic of Slovenia, Juni, 2017.

Anonymous, Inclusive Workplace: Inclusive Communication Guide, Department of Education of Queensland Government, supported by weallbelong.

Anonymous, The role of Media in Creating Inclusive, Just and Peaceful Societies: Guideline for SDC Media Assitance, Swiss Agency for *Development* and Cooperation SDC, 2020.

Anonymous, What is Freedom of Religion? Know Your Rights, Prepared by Church of Scientology International, 2017.

Athik H. Ummah, Digital Media and Counter-Narrative of Radicalism, Jurnal Theologia, Vol. 31, No.2, Desember 2020.

Cendikia Dwi Fitria, Manajemen Redaksional TribunPekanbaru.com Dalam Menentukan Berita yang Layak, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Universitas Riau, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016.

Christina Chan-Meetoo, Gender Sensitive Reporting, University of Mauritius, Januari 2013.

Cicek Tahaoglu dan Elif Akgul, Gender-Based Journalism Handbook, IPS Communication Foundation Publications, 2018.

Fathya Kautsar FA., Analisis Manajemen Redaksi dan Kebijakan Redaksional Pemberitaan Bulu Tangkis di Media Dari: Studi Kasus di Media Online Detik.com, Kompas.com dan Indosport.com, Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, 2020.

https://inclusivejournalism.medium.com/six-characteristics-of-inclusive-journalism-4df2bf7cf9f0

https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/alternative-narratives-and-inclusive-communication

Ibrahim S. Shaw, Human Rights Journalism: Advances in Reporting Distant Humanitarian Interventions, UK: Palgrave Macmillan, 2012.

Novia Kurnia, et. al., Modul Jurnalisme Inklusif: Liputan tentang Perempuan, Anak, dan Difabel Selama Pademi, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UGM, September 2021.

Reza Harahap, Pengertian Jurnalistik: Contoh Kode Etik, dan Ruang Lingkup Jurnalistik, kosngosan, Desember 2018. Sumber: https://www.kosngosan.com/2018/12/pengertian-jenis-dasar-contoh-jurnalistik.html

Syera A. Buntara, Siaran Pers SETARA Institute: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) 2022, SETARA Institute, 31 Januari 2023.

Verica Rupar and Chao Zhang, *Inclusive Journalism*, Media Diversity Institute, January 2022, hal. 5.

*****

Panduan ini suguhkan kepada jurnalis dan organisasi perempuan berbasis keagamaan *(faith-based women's organization)* dengan maksud membekali para jurnalis dan perempuan dengan pemahaman dan pengetahuan mengenai pandangan keagamaan yang inklusif, damai, dan toleran sehingga mampu mengaktualisasikan keterampilan jurnalisme inklusif dalam menuliskan dan menghasilkan produk-produk karya jurnalisme inklusif, berupa berita, opini, *feature*, video dan foto jurnalistik, maupun *podcast*, yang mampu menarik minat dan membangkitkan kesadaran pembaca akan persoalan-persoalan yang selama ini luput dan bukan menjadi *mainstream issues*.

Sekalipun modul ini didesain untuk jurnalis dan organisasi perempuan berbasis keagamaan, namun penyajiannya yang rinci memungkinkan siapa saja dapat menggunakan modul ini. Panduan-panduan penulisan atau pembuatan produk jurnalistik dalam modul ini memungkinkan setiap orang mengaplikasikan kegiatan serupa di lingkungannya. Replikasi dari kegiatan ini akan mempercepat penyebaran gagasan baik. Untuk itu, SETARA Institute berharap bahwa modul ini tidak hanya dibaca oleh jurnalis maupun organisasi perempuan berbasis keagamaan, namun juga bisa digunakan oleh aktivis NGO, aktivis perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, maupaun lingkup masyarakat yang lebih luas. []

9 786235 731094